

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Kajian terdahulu penelitian ini fokus menelaah riset terdahulu dengan memilih enam substansi kajian utama. Pertama, penelitian yang memfokuskan kajian pada konsep multikulturalisme. Kedua, kajian memprioritaskan nasionalisme sebagai alat perekat integritas. Ketiga, kajian multikulturalisme model nasionalistik etik. Keempat, multikultural-etnik. Kelima. Pendekatan mayoritas dan minoritas Keenam, kajian multikulturalisme pendekatan akulturasi budaya..

Pertama, penelitian yang fokus menelaah konsep multikulturalisme diantaranya: penelitian Hoon (2017), Penelitian ini membandingkan konsep pluralisme dan multikulturalisme serta bagaimana multikulturalisme diimplementasikan di Indonesia. Muhtar (2018), memfokuskan kajian pada konsep *tasamuh* dalam Islam. Penelitian Awang dkk. (2018), Penelitian ini menelaah konsep multikulturalisme dengan proses terciptanya perdamaian masyarakat di Ambon.

Penelitian Teuku, (2020) menelaah ontologi dan epistemologi pendidikan multikultural dan landasan atau konsep pendidikan multikultural perspektif Islam. Tujuan pendidikan multikultural Islam adalah untuk mewujudkan siswa yang pluralis dan memiliki kemampuan meminimalisasikan konflik agama, budaya, ras dan suku. Pada hakikatnya Islam memiliki konsep dasar yang sesuai dengan prinsip pendidikan multikultural yakni agama *rahmatan lil' alamin* yang termaktub dalam surat Al-Hujurat ayat 13.

Kedua, kajian memprioritaskan Ormas atau dalam organisasi baik keagamaan atau sosial. Penelitian Masrukhin & Supaat (2018), menekankan pada aspek sejarah, menyatakan bahwa terbentuknya ormas Islam pada hakikatnya bertujuan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Syamsuddin (2018), Penelitian ini menekankan pada dinamika internal gerakan dakwah Muhammadiyah di Kotagede. Kusuma & Susilo (2020). menelaah perbedaan sensitivitas dan kepekaan antara aktivis Islam dan aktivis kristen. Penelitian Lesmana et al. (2019), beberapa langkah penanaman nilai multikulturalisme dilakukan saat open *recruitment*, berikutnya nilai-nilai multikulturalisme terintegrasi dalam program HIMPARISSBA.

Ketiga, kajian multikulturalisme model nasionalistik etik, pendekatan ini menekankan pada unsur kesamaan keturunan, kekerabatan dan bahasa. (Razick et al., 2020). menelaah akar permasalahan yang merusak kerukunan dan stabilitas sosial negara antara penganut Buddha Sinhala dan komunitas Muslim. (Damanik, 2020), menelaah fenomena sikap intoleran dalam masyarakat multikultural. Secara empiris, substansi kajian difokuskan pada penguatan diskriminasi dan segregasi di Kota Medan. Multikulturalisme dipengaruhi oleh situasi etnisitas yang tidak menjamin munculnya sikap multikulturalis tetapi memiliki efek terkait, diskriminasi, dan segregasi yang paling sedikit. Penelitian Hierro & Gallego (2018), fokus kajian penelitian ini konflik politik membentuk identitas etno nasional dalam teks-teks kontra dimana kelompok nasional hidup berdampingan dengan minoritas etnis yang terkonsentrasi secara teritorial dan memenuhi syarat pandangan bahwa konflik mempolarisasikan identitas.

Penelitian (Verkuyten & Brug, 2004) menelaah etnis minoritas dan mayoritas di Belanda, yang memfokuskan pada dukungan multikulturalisme dalam identifikasi kelompok etnis. Dalam temuan penelitian ini, etnis minoritas mendukung ide multikulturalisme daripada kelompok mayoritas. Peneliti melihat bahwa psikologi sosial mampu memberikan kontribusi yang berharga terhadap isu-isu yang berkaitan dengan pengelolaan keanekaragaman budaya.

Keempat, multikultural-etnik, pendekatan menekankan pada hak-hak etnik secara kolektif. (Abdul Halim, 2019), Penelitian ini menelaah model multikulturalisme dan politik identitas dengan objek kajian Masyarakat Using. Etnis Using Islam, setidaknya mencerminkan dua hal, yaitu multikulturalisme berbasis lokalitas dan politik identitas. Kekhasan temuan penelitian ini terletak pada temuan bahwa modalitas etnis tampaknya lebih dominan daripada modalitas regional dan geografis. Zarbaliyev (2017), Fokus kajian penelitian ini Tantangan multikulturalisme di era globalisasi di Indonesia.

Penelitian, Wirawan & Widana (2020), lebih menekankan factor tradisi Mamarek untuk membangkitkan energi kebersamaan dalam masyarakat multikultural. Tradisi yang diikuti tiga agama yakni Islam, Hindu dan Budha tentunya dengan prosedur ritual berbeda, mampu menjadi instrumen komunikasi dalam menjalankan ritual keagamaan. (Basyir, 2000). dengan memfokuskan kajian

pada tradisi yang unik, yakni *Menyama Braya*, Menelaah hubungan umat Hindu dan Umat Islam pasca Bom bunuh diri di Denpasar 2002. Seperti temuan Wayan Ardhi Wirawana, Kunawi Basyir melihat bahwa inisiatif politik, sosial dan budaya menjadi fasilitator dialog antara warga Hindu dan Umat Islam.

Kelima. Pendekatan mayoritas dan minoritas. (Purwani et al., 2020), memfokuskan kajian pada kesadaran sosial dan sikap penerimaan atas perbedaan akan melahirkan sinergi dalam masyarakat multikultural. Hampir sama dengan temuan Purwani, penelitian (Anriani, 2018) perbedaannya penelitian ini memfokuskan kajian pada penguatan kelembagaan akar rumput. Modal dasar yang digunakan untuk menciptakan harmoni sosial dalam masyarakat multikultural adalah sikap masyarakat yang terbuka terhadap keragaman.

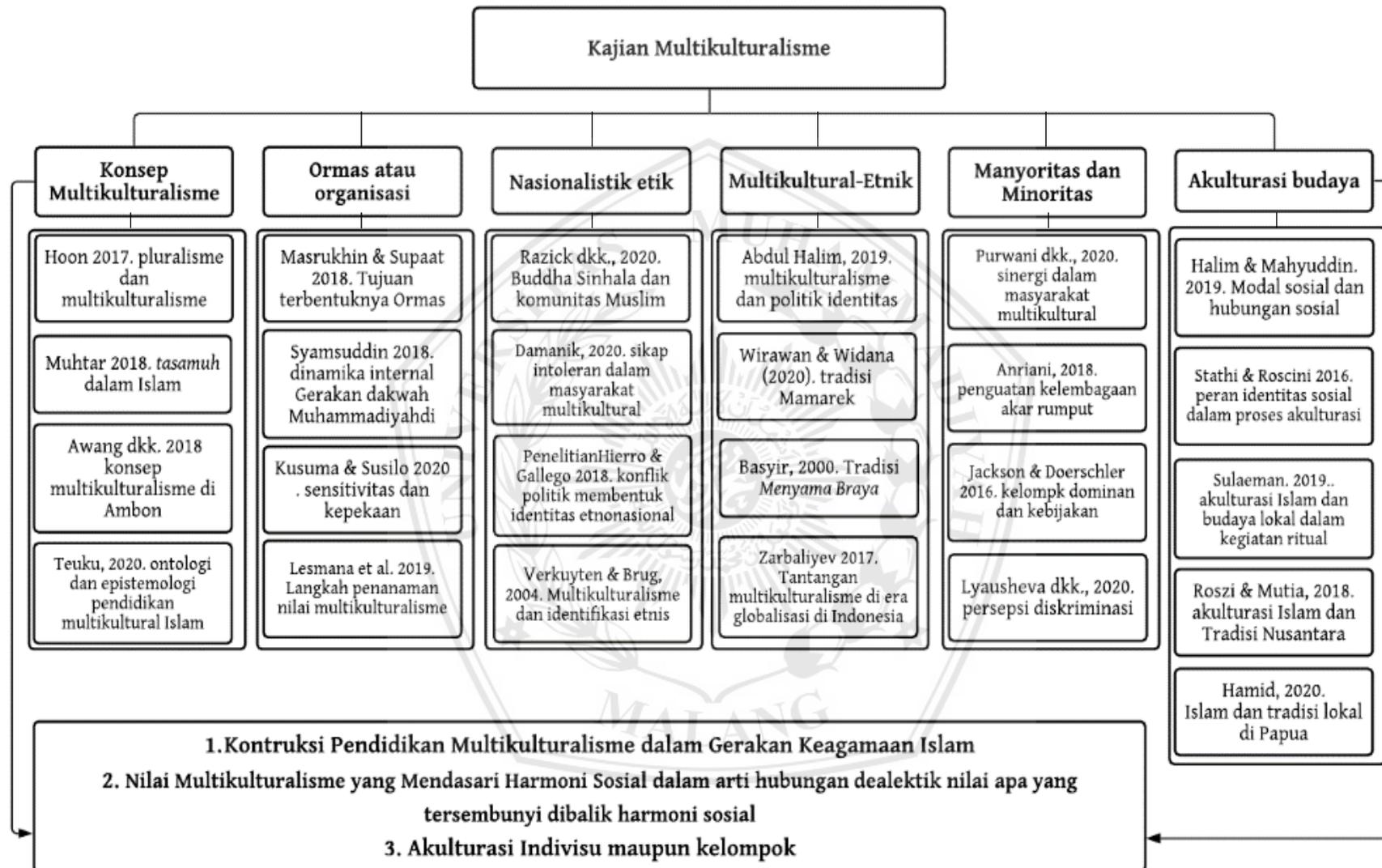
Penelitian Jackson & Doerschler (2016), menelaah efek psikologi sosial kelompok dominan dalam kebijakan multikultural. Dalam temuannya kebijakan multikultural dapat menjadi penyebab kekhawatiran hilangnya kebangsaan Kristen kulit putih membuat "konflik yang melekat dalam masyarakat. (Lyausheva et al., 2020), kajian ini menelaah pada persepsi diskriminasi sebagai prediktor bagaimana individu multikultural bernegosiasi dan mengkonfigurasi identitas budaya.

Keenam, kajian multikulturalisme pendekatan Akulturasi budaya. Halim & Mahyuddin (2019), beberapa temuan penelitian ini adalah; *Pertama*, Modal sosial adalah elemen penting dalam masyarakat multikultural. Modal sosial yang dikembangkan melalui lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan merupakan salah satu jalan yang menjembatani hubungan sosial yang baik. *Kedua*, Berbagai kelompok etnis telah mencapai perpaduan etnis dan penyatuan budaya. Mereka memiliki pemahaman yang sama tentang implementasi ritual keagamaan dan budaya dalam masyarakat yang membuat mereka selaras dalam keberagaman. Stathi & Roscini (2016), dengan focus peran identitas sosial dalam proses akulturasi dengan tujuan memahami dinamika yang dapat meminimalkan konflik antar kelompok dan memfasilitasi hubungan antar kelompok.

Penelitian Sulaeman (2019) mengkaji akulturasi Islam dan budaya lokal dalam kegiatan ritual di Keraton Yogyakarta. Penelitian (Roszi & Mutia, 2018), fokus penelitian ini pada proses akulturasi Islam dan Tradisi Nusantara. Temuan utama dalam penelitian ini bahwa akulturasi Islam dan budaya lokal, bahwa Islam

tidak terpengaruh oleh kepercayaan animisme, dinamisme Hindu dan Budha yang sudah ada sebelum Islam. Proses akulturasi Islam dan tradisi lokal bersifat saling mempengaruhi. Penelitian Hamid (2020) penelitian ini mencoba menghadirkan perspektif berbeda dari penelitian sebelumnya, untuk memahami Islam dan tradisi lokal di Papua. Kontribusi penelitian ini terletak pada bagaimana kerukunan umat beragama di Jayapura dipengaruhi oleh kontestasi politik nasional..

Dari beberapa hasil riset multikulturalisme di atas, hanya beberapa penelitian yang mengarahkan fokus kajian pada organisasi keagamaan Islam dengan konteks penelitian yang terbatas pada satu organisasi keagamaan. Selain itu beberapa penelitian multikulturalisme cenderung menggunakan pendekatan pluralisme agama atau moderasi agama. Serta belum ada yang menghubungkan multikulturalisme dan akulturasi tradisi keagamaan. Organisasi keagamaan Islam memiliki potensi yang besar untuk mensosialisasikan model keberagaman yang menghargai perbedaan dalam kemajemukan. Pendidikan non-formal menjadi alternatif penanaman nilai multikultural karena sifatnya yang luwes, mampu mengakomodir kebutuhan peserta didik, serta pembelajaran yang heterogeny (Laksono, 2017). Selain itu, temuan (Ridho, 2020, Saepudin, 2021) tentang signifikansi peran tokoh agama masyarakat menjadi dasar pentingnya konteks ini untuk diteliti. Gambaran peta penelitian terdahulu diilustrasikan pada gambar 2.1 berikut:



Gambar 2.1: Ilustrasi Penelitian Terdahulu

B. Genealogi Multikulturalisme

1. Pengertian Multikulturalisme

Konsep multikulturalisme memiliki hubungan dengan beberapa isu-isu perbedaan budaya. Beberapa konsep ini meliputi ras dan etnisitas, masyarakat dan budaya, dan agama (Raihani, 2014) menelaah konsep ini memiliki hubungan erat secara bersamaan juga memiliki perbedaan. Etnisitas merupakan kedudukan di dalam konteks sosial masyarakat, sedangkan ras dalam kamus Bahasa Indonesia memiliki makna golongan yang memiliki ciri-ciri fisik atau rumpun bangsa (KBBI, n.d.).

Asumsi dasar dari multikulturalisme adalah pandangan bahwa etnis, ras, agama, budaya dan kelas sosial merupakan komponen penting dari sebuah negara khususnya Amerika dan dunia Barat lainnya. Ini juga mengasumsikan bahwa keragaman memperkaya suatu bangsa dan memperkaya cara warganya memandang dan memecahkan problem pribadi dan publik. Saat individu dapat berpartisipasi dalam berbagai budaya yang beragama, dengan sendirinya masyarakat dapat manfaat dari pengalamannya (Banks, 2000).

Secara filosofis, asumsi dasar multikulturalisme adalah tentang kemuliaan dan kehormatan harkat dan martabat manusia (*human dignity*). Prinsip dasar ini dapat ditemukan di semua agama besar dunia. Karena status manusia yang tinggi, Maka hak yang melekat padanya harus dijaga dan dihormati. pelanggaran hak asasi manusia merupakan penindasan terhadap kemuliaan kemanusiaan universal. Oleh karena itu, keragaman selayaknya tidak menjadi penyebab konflik yang dapat merampas hak asasi manusia. Untuk ini sikap toleran harus diapresiasi (Roswati Nurdin, 2020).

Multikulturalisme berarti keberagaman budaya. terdapat tiga istilah yang umum digunakan untuk menggambarkan keberagaman baik berdasarkan agama dan ras, etnis, bahasa, dan budaya, yakni pluralitas, keragaman (*diversity*) dan multikultural (*multicultural*). Namun semuanya memiliki konotasi yang berbeda. Multikulturalisme dipahami "sistem kepercayaan" dan tindakan mengakui dan menghormati keberadaan Semua kelompok berbeda dalam organisasi, atau Masyarakat, menghormati dan mengakui perbedaan sosial budaya, mendorong dan memfasilitasi berkontribusi secara berkesinambungan

dalam konteks tatanan budaya Inklusif yang memberikan ruang yang sama untuk semua masyarakat (Roswati Nurdin, 2020).

Berbeda dengan konsep pluralisme yang menitikberatkan perhatiannya pada keanekaragaman suku bangsa dan kebudayaannya, dalam pandangan pluralisme setiap kebudayaan merupakan sebuah entitas yang distingtif, sedangkan multikulturalisme menitikberatkan perhatiannya pada relasi antar-kebudayaan dengan asumsi bahwa suatu kebudayaan harus memperhatikan dan mempertimbangkan keberadaan kebudayaan lainnya. Asumsi ini yang melahirkan gagasan toleransi, kesetaraan, saling menghargai, dan sebagainya. Membangun masyarakat multikulturalisme berarti membangun masyarakat dengan suatu ideologi yang menempatkan kesetaraan dalam keragaman sebagai posisi sentral. (Syarifuddin, 2020)

Istilah multikulturalisme dalam Parekh (2012) mengandung tiga komponen, *pertama*, konsep mengacu kepada kebudayaan, *kedua*, konsep terkait keragaman kebudayaan. *ketiga*, konsep ini mencakup cara tertentu dalam menanggapi keanekaragaman. Oleh karena itu, multikulturalisme bukanlah teori politik yang pragmatis, melainkan perspektif atau ideologi kehidupan manusia. Karena hampir semua negara di dunia terdiri dari keragaman budaya yang menempatkan perbedaan sebagai dasar pergerakan manusia dari satu tempat ke tempat lain di bumi semakin intensif, multikulturalisme menjadi ideologi yang harus ditransformasikan dalam bentuk kebijakan multikultural yang menekankan pada kesetaraan dan saling menghormati

2. Sejarah Multikulturalisme

Multikulturalisme pada awalnya merupakan gerakan sosial yang mencita-citakan kesetaraan dan keadilan sosial melalui penghapusan hak pilih universal dan gerakan protes terhadap nativisme dan perlakuan diskriminatif terhadap imigran dan masyarakat adat, meskipun dalam penerapannya keadilan sosial dan kebebasan bagi semua akan sulit direalisasikan dalam sebuah studi inovatif tentang kehidupan orang Afrika-Amerika di tahun 1940-an, mengartikulasikan kenyataan ini sebagai "dilema Amerika" klasik, yaitu, perumusan cita-cita kesetaraan dan keadilan dengan realitas perbudakan yang diskriminatif,

supremasi kulit putih, dan kekerasan terhadap perempuan, Afrika Amerika, Pribumi Amerika, kelas pekerja, dan imigran (Myrdal, 1996, Nieto, 2017).

Pada tahun 1950-an, embrio lahirnya gerakan yang menuntut persamaan hak dari kalangan kelompok minoritas khususnya ras kulit hitam. Puncak gerakan ini terjadi pada tahun 1960-an. Gerakan inilah yang menginspirasi lahirnya larangan diskriminasi yang banyak dilakukan oleh ras kulit putih terhadap ras kulit hitam. Keberhasilan perjuangan hak sipil ini kemudian dilanjutkan pada tuntutan pemberian hak akses dan beberapa kemudahan bagi orang kulit hitam, hal ini dilakukan supaya bangsa kulit hitam dapat mengejar dan menyetarakan ketertinggalan mereka dalam posisi politik dan berbagai usaha (Suparlan, 1999).

Istilah multikulturalisme pertama kali muncul di Kanada sekitar tahun 1950-an. multikulturalisme ditujukan untuk menggambarkan kondisi masyarakat perkotaan yang multikultural dan multilingual. selanjutnya konsep multikulturalisme menjadi merupakan respon dinamika masyarakat plural dan kompleks, bahkan menjadi strategi integrasi kebudayaan (Rosyada et al., 2003). Pada terjadinya konflik antar suku, ras, agama, bangsa, aliran politik yang terjebak pada dominasi yang pada akhirnya dapat terselesaikan dengan sosialisasi dengan membangun masyarakat multikultural yang menekankan pada kesamaan budaya, dan saling menghargai hak dari komunitas dan budaya lain. Efektifitas konsep multikulturalisme membuat konsep ini mudah menyebar dan meluas di Eropa dan Amerika.

Secara demografis Multikulturalisme jauh sebelumnya di Kanada pada saat konfederasi ketika negara itu dibentuk pada tahun 1867, Situasi yang mendasari lahirnya ide multikulturalisme pada tahun 1867 adalah fenomena diskriminasi, dengan Inggris yang dominan, dari literatur sejarah saat ini mengacu pada periode kolonial dan konfederasi yang memiliki tiga kelompok etnis, terdiri dari masyarakat Aborigin, Prancis, dan Inggris. Namun, dua kelompok terakhir dianggap sebagai kelompok piagam karena dominasi mereka dalam periode pra-konfederasi dari awal 1600-an hingga 1867 dimulai pertama dengan rezim Perancis dan kemudian diikuti oleh Inggris.

Pasca konfederasi, dari akhir 1800-an hingga awal 1900-an, keragaman etnis meningkat dengan datangnya banyak kelompok Eropa dan juga beberapa kelompok non-Eropa seperti Cina (pekerja kereta api), Jepang (pekerja pertanian) dan Kulit hitam (Nieto, 2017). Namun multikulturalisme, sebagai kebijakan publik dan negara, baru ada sejak tahun 1970-an. Pada tahun 1963, Perdana Menteri Lester B. Pearson mendirikan Komisi Kerajaan untuk bilingualisme dan bikulturalisme di Kanada (Nieto, 2017).

Multikulturalisme digunakan dalam banyak wacana berbeda dan memiliki banyak makna, multikulturalisme dapat digambarkan sebagai gerakan yang berorientasi kebijakan yang mempromosikan “masyarakat multikultural” yang ditandai dengan keragaman ras, budaya, dan etnis (Glazer, 1997; Verheul, 2009). Dalam pandangan (Goldberg 1994, Verheul 2009) sejarah multikulturalisme dapat dipahami sebuah reaksi terhadap asimilasi, klaim monokultural yang telah menjadi wacana dominan dan hampir tidak lagi diperdebatkan di Amerika Serikat. Menariknya, (Goldberg, 1994, Verheul, 2009) menunjukkan bahwa monokulturalisme Amerika ini sangat diinformasikan oleh gagasan budaya Eropa tentang budaya tinggi

Sejarah multikulturalisme diawali Teori *melting pot* yang digagas oleh J. Hector Imigran berasal Normandia. Hector menekankan kesatuan budaya. Ide ini menyebabkan imigran harus menerima budaya Amerika, walaupun pada hakikatnya monokultur lebih didominasi oleh budaya Oni Oxon Saxon putih (The Editors, 2009, Rosyada, 2014).

Dalam pandangan Banks (2000) *melting pot* disebabkan oleh pengetahuan Individu tentang budayanya hanya dari perspektif budayanya sendiri menjadi bagian penting dari pengalaman manusia dikemas secara budaya dan etnis. Orang-orang ini juga tidak dapat mengetahui budaya mereka sendiri sepenuhnya karena budaya mereka sudah begitu saja. Fukuyama (2018), Kimball (2008) kondisi ini menimbulkan tantangan bagaimana mengasimilasi dan mengintegrasikan para tamu ke tanah Eropa dan Amerika. Mereka mempraktekkan agama non-Kristen seperti Islam, Budha, Hindu, Sikh, Konghucu, dan agama Afrika, dll

Sejak 1960-an, ketika etnik Amerika semakin beragam dan mengalami dinamika perkembangan budaya yang semakin majemuk, teori *melting pot* dianggap tidak lagi merealisasikan visi pluralisme, Menurut Berry, (2019) Kelemahan utama teori *Melting Pot* adalah ia mengabaikan konteks lokal yang ada yang mempengaruhi pilihan dan tindakan kelompok dominan dan minoritas, yang berdampak terhadap akulturasi.

Kegelisahan terhadap teori *Melting Pot*, menuntut lahirnya pemikiran baru yakni, *salad bowl* sebagai alternatif dan dipopulerkan oleh Kallen Horace Kallen. Teori *Salad Bowl* mempertahankan identitas unik individu. Kelebihan dari teori *Salad Bowl* adalah pengakuan identitas diskrit dan perbedaan budaya dari masyarakat multikultural. (Brown & Bean, 2006, Berray, 2019). *Salad Bowl* mempertahankan individualitas dan kemandirian kelompok etnis, dan memungkinkan keberadaan mereka secara berdampingan dengan budaya dominan. Ini menghilangkan tekanan untuk membuat (Thornton, 2012, Berray, 2019).

a. Multikulturalisme di Asia

Berbeda dengan Eropa, perdebatan tentang multikulturalisme di Asia berkisar pada pertanyaan tentang bagaimana negara-negara pascakolonial penuh dengan perdebatan dan konflik etno-nasionalis yang berpusat di sekitar masalah bahasa, etnis dan identitas agama dapat menjadi negara multikultural yang kohesif. Hampir semua negara Asia terlibat dalam konflik yang berpusat di sekitar identitas politik-etnis yang ditemukan seperti sektarianisme Sunni-Syiah di Timur Tengah dan kebangkitan nasionalis etno religius Hindu dan Buddha di India, Myanmar, Sri Lanka (Harris, 2009, Grassley, 2018, Vali Nasr, 2007, Hansen & Seminary, 2009, Badley, 2005, Yunus & M, 2014).

Tantangan multikulturalisme di Asia memiliki wajah yang berbeda. Ia menghadapi tugas untuk mengakomodasi perbedaan suku-budaya-agama di negara-negara pasca kolonial dalam menghadapi ketidak mampuan konstitusi yang membuat minoritas menerima tindakan diskriminatif. Bagaimana membangun model demokrasi yang mengakui perbedaan multikultural yang berakar pada keragaman bahasa, etnis dan agama di

tengah meningkatnya nasionalisme, agama dan politik yang menyerukan pembongkaran sistem parlementer yang dalam pandangan mereka lebih menguntungkan minoritas daripada mayoritas. (Nagy, 2014) komunitas Sosial-Budaya ASEAN yang kohesif yang beraneka ragam etnis, multibahasa dan multi-agama, dan yang akan “mengangkat kualitas hidup masyarakatnya melalui kegiatan kerja sama yang berorientasi pada masyarakat, berpusat pada masyarakat, ramah lingkungan, dan diarahkan pada promosi pembangunan berkelanjutan untuk menghadapi tantangan baru dan yang muncul di ASEAN (Yusuf et al., 2018).

b. Multikulturalisme di Indonesia

Dalam konteks Indonesia Multikulturalisme mulai menjadi perbincangan bersamaan dengan proses demokratisasi pasca runtuhnya kekuasaan orde baru 1998 (C.-Y. Hoon, 2006). Di sisi yang berbeda runtuhnya kekuasaan orde baru menandai era baru yakni era demokratis akan tetapi dalam catatan (Sakai & Fauzia, 2014) pemikiran pluralisme agama masih dibatasi oleh beberapa peraturan pemerintah, serta meningkatnya Islamisme dan intoleransi.

Kehadiran kelompok agama radikal menjadi penghambat berkembangnya paham toleransi agama bahkan pluralisme dipandang sebagai ancaman bagi masa depan agama. Kelompok Islam radikal menemukan ruang demokrasi baru untuk mempromosikan, mensosialisasikan agenda keagamaan dalam ruang public. Beberapa kasus penyerangan terhadap kelompok minoritas semakin mengkhawatirkan (Arifin, 2010, Fauzi et al., 2011).

Masyarakat memandang bahwa Pluralisme dan multikulturalisme tidak banyak perbedaan, Akan tetapi secara definisi terdapat beberapa perbedaan, karena pluralisme lebih mengarah kepada agama sedangkan multikulturalisme mengarah ke budaya.

Pada kenyataannya agama dan budaya layaknya dua sisi mata uang yang saling melengkapi. Beberapa pertimbangan penggunaan istilah multikulturalisme dalam penelitian ini adalah pandangan C. Y. Hoon (2017) . *pertama*, Multikulturalisme harus menjaga keseimbangan antara kesatuan

dan kebhinekaan, berargumen bahwa gagasan tentang kesatuan bangsa multicultural, bersatu dalam keberagaman menjadi konsep yang ambigu dan paradoks, meskipun dalam konteks kajian akademik diskusi tentang pengertian keduanya tidak akan pernah bisa diselesaikan (Nye, 2007). Hoon, (2006), berpendapat bahwa multikulturalisme tidak berlawanan dengan nasionalisme karena menjadi suatu kebijakan, multikulturalisme menyangkut masalah dan proses yang tertanam dalam konstruksi dan pembangunan identitas nasional.

Kedua, Multikulturalisme harus memberikan ruang untuk mengakui lintas batas budaya dan hibriditas. Selain itu, pemahaman multikulturalisme pada level individu ini juga dapat diterjemahkan ke dalam level sosial, terutama dalam akomodasi negara tidak hanya terhadap keberadaan kelompok etnis yang berbeda tetapi juga keberagaman dalam setiap kelompok etnis. (C.-Y. Hoon, 2006). *Ketiga*, Perlunya Multikulturalisme mengintegrasikan agama dalam kajiannya.

Hoon (2017) mencatat beberapa perbedaan pluralisme dan multikulturalisme. *Pertama*, pluralisme menekankan interaksi yang terbatas. Sedangkan Multikulturalisme memberikan ekspresi pengalaman kelompok budaya. *Kedua*, upaya realisasi sebagian besar bergantung pada upaya keterlibatan dan dialog dari bawah ke atas sedangkan multikulturalisme berdasarkan kebijakan inklusi dan pengakuan. *Ketiga*, pluralisme berfokus pada menemukan kesamaan dan mencari *consensus*, sedangkan multikulturalisme berfokus pada hak, kewarganegaraan dan perbedaan serta menangani kontestasi.

Augie Fleras (2009), Modood (2010) Multikulturalisme agama berfokus pada peran pemerintahan dan membutuhkan keterlibatan dinamis negara untuk melindungi penduduk agamanya, terutama agama minoritas lebih jauh Kymlicka (1995) menjelaskan peran negara dalam tataran aplikasi konsep multikulturalisme: (1) negara harus dipandang milik semua warga negara secara setara, dan (2) individu harus dapat mengakses lembaga negara, dan berpartisipasi secara penuh dan setara antar warga negara dalam kehidupan politik, tanpa harus mengingkari identitas keagamaannya.

Selaras dengan Kymlicka, Werbner (2012) melihat fungsi negara sangat penting untuk implementasi multikulturalisme yang dilembagakan.

Dalam pandangan Crouch (2009) kuncinya adalah menjaga keseimbangan antara keterlibatan negara dalam memastikan perlindungan hak-hak minoritas dan toleransi perbedaan di ranah publik, sekaligus memberi ruang bagi partisipasi sipil dan pemupukan lintas budaya secara organik di antara warga negara. C. Y. Hoon (2017) menyerukan pemerintah proaktif yang secara eksplisit mengintervensi pihak minoritas, untuk melindungi hak konstitusional mereka atas kebebasan beragama. Kewarganegaraan lebih dari sekedar status hukum atau kategori administratif; itu termasuk praktik politik, serta mode partisipasi dalam kehidupan public (Stokes, 2008). Keanggotaan dan partisipasi dalam organisasi keagamaan non-pemerintah dan lembaga keagamaan dapat dianggap sebagai tindakan "kewarganegaraan beragama" (Crouch, 2009), (Modood, 2010)

3. Orientasi dan Pendekatan Multikulturalisme

Pendidikan multikultural memiliki tujuan ganda: mengelola keberagaman dalam suatu bangsa, dan membangun toleransi, rasa hormat, dan persatuan antar warga negara. Secara teori, kedua tujuan ini dapat hidup berdampingan, seperti dalam semboyan nasional seperti "Bhinneka Tunggal Ika." akan tetapi, dalam praktiknya, tujuan mengakui keragaman dan memelihara persatuan nasional terkadang mengalami ketegangan, karena sebagian warga khawatir bahwa penekanan pada keragaman mengancam persatuan negara-bangsa, sementara yang lain merasa bahwa gerakan nasionalis mengancam persatuan. "menetralkan" identitas etnis (Baumann, 1999, Callan, 2009, Moland, 2015)

Multikulturalisme dipandang sebuah konsep memiliki banyak lapisan atau dimensi yang berbeda. Dimensi atau konseptualisasi, diklarifikasi, didefinisikan atau dielaborasi oleh para sarjana di awal tulisan mereka. Misalnya, Joseph Garcea (2009) memaknai berbeda antara "filsafat publik multikultural (ideologi) dan" kebijakan publik multikultural "(kebijakan resmi negara) dalam analisisnya tentang efek fragmentaris multikulturalisme di Kanada dan (Fleras & Elliott, 2002) membedakan antara multikulturalisme resmi (kebijakan) dan

multikulturalisme kritis (wacana). Lebih lanjut, pendekatan multikulturalisme dapat dibedakan berdasarkan perspektif disipliner dan poin ini akan dibahas secara singkat di bagian selanjutnya.

Fleras dan Elliott membedakan dimensi multikulturalisme di Kanada (Fleras & Elliott, 2002) perbedaan dibuat mengenai dimensi multikulturalisme: 1) fakta empiris; 2) ideologi; 3) latihan; 4) kritik; dan 5) kebijakan negara. Perbedaan antara multikulturalisme sebagai kebijakan resmi negara dan multikulturalisme seperti yang dipraktikkan masyarakat dalam paparan (Werbner, 2012) "dari atas" vs. "dari bawah". Multikulturalisme "dari bawah" berkenaan dengan multikulturalisme wacana dengan dimensi politik yang dimainkan dalam komunitas lokal dan perbedaan "dari atas" di mana negara merencanakan multikulturalisme melalui kebijakan dan terlibat dalam pengelolaan keanekaragaman. Dalam pengertian ini multikulturalisme "dari bawah" adalah multikulturalisme sehari-hari yang berkaitan dengan pengalaman hidup sehari-hari dan perjuangan politik masyarakat suku-budaya dan ras (Chuong & Safdat, 2016).

Menelaah beberapa penelitian multikultural poskolonial non-Barat, dapat dipahami bahwa terdapat dua wawasan penting yang harus diintegrasikan dalam wacana multikulturalis. *Pertama*, seperti pada paparan sebelumnya bahwa multiculturalism lahir dari negara Barat dalam konteks ini tentu memiliki perbedaan dengan negara non-Barat. Kondisi ini kemudian mengalami kegelisahan (Zimmerman, 2001, Banks, 2014) dan mempertanyakan ketepatan ide multikulturalisme dalam konteks culture yang berbeda. Kebingungan berikutnya adalah jenis perbedaan seperti apa yang harus ditoleransi dan perbedaan seperti apa yang akan meningkatkan ketegangan. Di sisi yang berbeda masa depan multikulturalisme di dunia non-Barat, dalam kajian Moland (2015) yang menelaah Pendidikan Multikultural di Nigeria, faktor kontekstual seperti politik dan perilaku masyarakat justru dapat mereduksi tujuan utama multikulturalisme.

Istilah 'multikulturalisme memiliki implikasi dan makna yang berbeda tergantung pada lokasi sosial, politik, dan disiplinnya sehingga multikulturalisme dapat dipahami secara konservatif atau radikal, dalam tataran

kebijakan public, multikulturalisme dapat memiliki implikasi dan hasil yang berbeda tergantung pada konteksnya. perbedaan budaya yang dinegosiasikan (Modood & Werbner, 1997). Setidaknya terdapat tiga pemahaman multikulturalisme. *Pertama*, multikulturalisme sebagai ideologi, *kedua* multikulturalisme isu sosial, *ketiga*, multikulturalisme sebagai studi akademis multikulturalisme (Nye, 2007)

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami multikulturalisme, Nye (2007) mengusulkan agar Multikulturalisme dipandang sebuah proses, dan proses semacam itu selalu kontekstual dengan tempat dan pengalaman budaya tertentu. Jadi, harus diakui bahwa pengalaman multikulturalisme di Inggris adalah unik untuk negara Inggris, dan berbeda dengan multikulturalisme di negara lain, seperti Kanada, Australia, Malaysia, atau Indonesia. Artinya, analisis dan pemahaman kita tentang multikulturalisme dalam setiap konteks ini juga harus kontekstual, dan kita tidak boleh mencoba memahami satu dalam kerangka yang lain. Distribusi dan percampuran penduduk di setiap negara bersifat spesifik, seperti halnya sejarah migrasi, dan sejarah hubungan antar kelompok dalam konteks multikultural. Tentu saja sangat penting untuk menghubungkan pengalaman khusus multikulturalisme dengan cara-cara di mana isu-isu keragaman.

4. Multikulturalisme Pendidikan

Pendidikan multikultural tumbuh dari gejolak Gerakan Hak Sipil tahun 1960-an. Selama dekade ini, orang Afrika-Amerika memulai pencarian untuk hak-hak mereka yang belum pernah terjadi sebelumnya di Amerika Serikat. Tujuan utama Gerakan Hak Sipil tahun 1960-an adalah menghapus diskriminasi dalam akomodasi publik, perumahan, pekerjaan, dan Pendidikan (Banks, 2014). Konsekuensi dari Gerakan Hak Sipil memiliki pengaruh yang signifikan pada lembaga pendidikan kelompok etnis pertama Afrika Amerika dan kemudian kelompok lain menuntut sekolah dan lembaga pendidikan lainnya mereformasi kurikulum untuk mencerminkan pengalaman, sejarah, budaya, dan perspektif mereka.

Keberhasilan Gerakan Hak Sipil yang nyata, ditambah dengan meningkatnya kemarahan dan suasana nasional yang liberal, mendorong

kelompok-kelompok terpinggirkan lainnya untuk mengambil tindakan untuk menghilangkan diskriminasi terhadap mereka dan menuntut agar sistem pendidikan menanggapi kebutuhan, aspirasi, budaya, dan sejarah mereka. Gerakan hak-hak perempuan muncul menjadi salah satu gerakan reformasi sosial yang paling signifikan pada abad ke-20 (Banks, 2004)

Multikulturalisme merambah ke dunia akademik di universitas Amerika. Multikulturalisme menjadi seruan untuk program akademik baru yang berfokus pada kelompok minoritas dan "*subaltern*". Ini juga membuka jalan bagi ekspresi baru apresiasi estetika dalam studi sastra dan bentuk persetujuan moral dan emosional dalam studi budaya. Penulis fiksi dari berbagai latar belakang budaya dimasukkan dalam buku teks dan antologi sastra Amerika yang masuk ke dalam kurikulum akademis. Selain itu, multikulturalisme secara bertahap berkembang menjadi teori politik yang dianalisis dan dikanonisasi dalam sejumlah studi ilmiah berpengaruh yang diterbitkan dalam dekade terakhir abad ke-20 oleh berbagai filsuf politik (Anthony et al., 2007). Sedangkan Zubaeda menyebutkan bahwa multikulturalisme dijadikan merupakan perangkat analisis atau perspektif untuk menelaah dinamika perkembangan keragaman budaya dan tradisi masyarakat, perbedaan etnis, bangsa, agama dan perbedaan latar belakang sejarah (Zubaedi, 2007).

Asumsi yang menjadi dasar pijakan multikulturalisme. *Pertama* adalah bahwa jika seorang anak etnis belajar tentang budaya dan asal etniknya, prestasi pendidikan anak akan meningkat. *kedua*, terkait erat dengan yang pertama, adalah bahwa dalam belajar tentang budaya dan tradisinya sendiri, anak akan meningkatkan peluangnya untuk mendapatkan kesempatan yang sama. *ketiga* adalah bahwa pendidikan multikultural hanya untuk imigran dan kelompok minoritas, bahwa belajar tentang budaya lain akan mengurangi prasangka dan diskriminasi anak-anak dan orang dewasa terhadap mereka dari latar belakang budaya dan etnis yang berbeda (Bullivant, 1981).

Sedangkan Hernandez (2000) mengidentifikasi tiga asumsi dasar yang mendasari konsep pendidikan multikultural. *pertama* adalah bahwa semakin penting untuk alasan politik, sosial, pendidikan dan ekonomi untuk mengakui bahwa kehidupan dalam masyarakat yang beragam secara budaya.

Pengembangan keterampilan untuk hidup dalam masyarakat yang begitu dinamis merupakan bagian yang berkesinambungan, perlu perhatian dari pendidikan formal dan informal. *kedua* bahwa pendidikan multikultural adalah untuk semua siswa. Ada kesalahpahaman di Amerika Serikat, bahwa pendidikan multikultural ditujukan terutama untuk siswa kelompok minoritas. *Ketiga*, bahwa pendidikan multikultural identik dengan pengajaran yang efektif. Strategi pengajaran yang efektif membantu siswa untuk memperoleh keterampilan akademik, ide dan informasi, mengembangkan nilai-nilai dan keterampilan sosial, dan memahami diri mereka sendiri, serta lingkungan mereka. Sebagai bagian dari proses pembelajaran Guru didorong untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam dan lebih luas tentang siswa.

Kedua asumsi dasar multikulturalisme, kemudian menjadi dasar pijakan kritis tentang perubahan konsep yang mengiringinya. Asumsi Bullivant (1981) melakukan pengenalan dasar terhadap pengembangan Pendidikan multikultural, sedangkan asumsi Hernandez (2000), lebih menekankan pada urgensi Pendidikan politik, masyarakat, ekonomi dan pengakuan terhadap keragaman budaya. Pijakan asumsi ini menginspirasi penelitian (Todd, 1991), (Ladson-Billings, 1995), (Gollnick & Chinn, 2016). Menjadikan asumsi awal untuk mendukung Pendidikan multikultural dan memberikan kerangka keilmuan dalam penyusunan konsep ras, kelas sosial, dominasi, kesetaraan keadilan sosial dan hak asasi

Banks (2014), mendefinisikan Pendidikan multikultural dengan *people of color*, dalam makna berbeda Banks ingin menjelaskan bahwa Pendidikan multikultural merupakan Pendidikan yang menekankan pada keniscayaan perbedaan dan keragaman sebagai bagian dari anugerah Tuhan. Pendidikan multikultural menggabungkan gagasan bahwa semua siswa terlepas dari jenis kelamin, orientasi seksual, kelas sosial, dan karakteristik etnis, ras, atau budaya mereka harus memiliki kesempatan yang sama untuk belajar. Gagasan penting lainnya adalah bahwa beberapa siswa, karena karakteristik ini, memiliki kesempatan lebih baik untuk belajar di sekolah sebagaimana mereka saat ini terstruktur daripada siswa yang tergabung dalam kelompok lain atau yang memiliki karakteristik budaya yang berbeda.

Teori dan penelitian dalam pendidikan multikultural menunjukkan bahwa total sekolah harus direformasi agar dapat melaksanakan pendidikan multikultural secara komprehensif dan efektif. Sekolah menjadi variabel Pendidikan harus direformasi dalam rangka mengakomodir kebutuhan Pendidikan multiculturalism.

Banks (2014) melihat bahwa terdapat dua paradigma yang bisa digunakan dalam menelaah pendidikan multikultural yakni paradigma deprivasi budaya dan paradigma perbedaan budaya. Kedua paradigma ini sangat berbeda asumsi, temuan penelitian, dan implikasinya. Guru yang menganut paradigma deprivasi budaya dan mereka yang menganut paradigma perbedaan budaya cenderung untuk menanggapi secara berbeda siswa berpenghasilan rendah dan siswa kulit berwarna di interaksi kelas dan memiliki ide yang berbeda tentang bagaimana meningkatkan prestasi akademik mereka.

Asumsi deprivasi budaya memfokuskan pada perubahan siswa dari pada perubahan budaya sekolah. Sehingga Guru dan administrator yang menganut paradigma deprivasi budaya seringkali menyalahkan korban atas masalah dan kegagalan akademis mereka (Bomer et al., 2008) Ahli teori ini meyakini bahwa karakteristik seperti kemiskinan, keluarga yang tidak teratur, dan kondisi broken home menyebabkan anak-anak dari masyarakat berpenghasilan rendah mengalami “kekurangan pemahaman budaya” dan “defisit kognitif yang tidak dapat diperbaiki. Pandangan ini mempengaruhi pandangan tentang tujuan pendidikan pada memberikan pengalaman budaya dan pengalaman lain kepada siswa yang “dirampas secara budaya” yang akan mengimbangi defisit kognitif dan intelektual mereka.

Berbeda dengan paradigma deprivasi budaya. paradigma perbedaan budaya percaya bahwa kelompok etnis seperti Afrika Amerika, Orang Amerika Meksiko, Amerika Asia, dan Penduduk Asli Amerika memiliki budaya yang kuat, kaya, dan beragam (Gay, 2010). Budaya tersebut terdiri dari bahasa, nilai, gaya perilaku, dan perspektif yang dapat memperkaya kehidupan semua orang Amerika. Siswa berpenghasilan rendah dan siswa kulit hitam gagal berprestasi di sekolah bukan karena mereka memiliki budaya yang dirampas secara budaya

tetapi karena budaya mereka berbeda dari budaya sekolah dan budaya mainstream (Ladson-Billings, 2009).

Dolce (1973), Memaknai pendidikan multikultural dengan sebuah refleksi dari sistem nilai yang menekankan penerimaan perbedaan perilaku yang berasal dari sistem budaya yang berbeda dan dukungan aktif dari hak perbedaan tersebut untuk eksis.

Selanjutnya Dolce (1973), memaparkan karakteristik Multikultural. *Pertama*, Multikulturalisme adalah cerminan dari sistem nilai yang menekankan penerimaan perbedaan perilaku yang berasal dari sistem budaya yang berbeda dan dukungan aktif atas hak perbedaan tersebut untuk eksis. Sebuah sistem nilai, multikulturalisme tidak tunduk pada bukti empiris atau sanggahan, atau diskusi rasional sejauh diskusi tersebut berkaitan dengan nilai-nilai itu sendiri. *Kedua*, Konsep multikulturalisme melampaui masalah ras. Korelasi antara ras dan budaya sama sekali tidak didukung oleh bukti. *Ketiga*, multikulturalisme bukan sekadar metodologi baru yang dapat digabungkan ke dalam program pendidikan. Konsep multikulturalisme dalam pendidikan didasarkan pada pandangan masyarakat yang berbeda dari apa yang tampak saat ini. Setiap program yang mencerminkan komitmen terhadap satu model pandangan.

Keempat, Keadaan multikultural bukanlah keadaan tanpa ketegangan. Budaya yang berbeda dapat dan mencakup nilai-nilai tertentu yang bertentangan dan antagonis. Interaksi budaya tersebut akan cenderung menciptakan ketegangan baru dan mungkin meningkatkan ketegangan yang sudah ada. *Kelima*, berdasarkan pada sikap saling menghormati antar budaya yang berbeda, multikulturalisme bukanlah eufemisme bagi yang kurang beruntung. Budaya tidak secara inheren lebih unggul atau lebih rendah satu sama lain.

Gordon (1997), Mengemukakan lima dimensi pendidikan multikultural yang membantu kita memahami sifatnya yang komprehensif dan beragam: integrasi konten, konstruksi pengetahuan, pengurangan prasangka, pedagogik kesetaraan, dan budaya sekolah. Dalam konteks telaah Pendidikan multikultural McLaren (1995) mengkritik pendidikan multikultural karena pandangan yang terlalu sederhana dan naif tentang hubungan kekuasaan sosial dan budaya yang

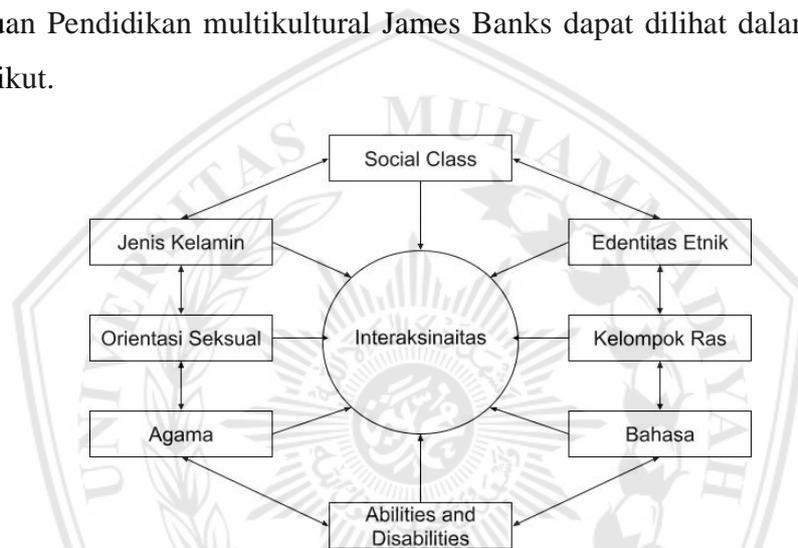
lebih luas. Selain itu, McLaren menyarankan bahwa bentuk etnis yang dominan, yaitu ras kulit putih, dibuat seakan tidak terlihat dalam diskusi multikulturalisme.

Perry (2002) mengemukakan bahwa ada dua jenis praktik multikulturalisme dalam pendidikan: “multikulturalisme konservatif” dan “multikulturalisme liberal.” Multikulturalisme konservatif adalah model keragaman budaya asimilasi di mana kulit putih ditempatkan menjadi norma yang dengan perspektif etnis lain dinilai, sehingga memperkuat hegemoni kulit putih. McLaren (1995) Multikulturalisme konservatif cenderung meminggirkan dan mengabaikan pengalaman yang berbeda dari siswa/klien kulit berwarna dan menghindari analisis kekuatan dari bentuk institusional rasisme.

McLaren (1995), menawarkan gagasan tentang multikulturalisme kritis. Di sini ia menyerukan restrukturisasi tatanan sosial melalui pendekatan radikal terhadap Pendidikan. Multikulturalisme kritis mencakup ciri-ciri berikut: (1) Mengakui konstruksi sosio-historis ras, dan persinggungannya dengan kelas, gender, bangsa, seksualitas, dan kapitalisme; (2) menciptakan kondisi pedagogis dimana siswa menelaah dengan seksama fenomena perbedaan (3) menantang gagasan pekerjaan sosial (dan ilmu-ilmu sosial lainnya) menjadi praktik trans-historis politis yang dipindahkan dari perebutan kekuasaan dalam sejarah; dan (4) memperlihatkan konstruksi historis dan sosial bangsa kulit putih.

Oleh karena itu, multikulturalisme kritis lebih inklusif terhadap siswa/pekerja sosial kulit putih dan mungkin memiliki dampak paling mendalam pada mereka. Siswa kulit putih didorong untuk secara kritis merefleksikan dan mendekonstruksi apa arti "kulit putih" bagi mereka (Ladson-Billings, 2001). Lebih lanjut, (Stokke & Lybæk, 2018) memberikan alternatif, dengan mengemukakan konsep multikulturalisme kritis dalam gerakan sosial mengacu pada perjuangan minoritas dalam kesetaraan. Interkulturalisme dalam kebijakan membuka ruang dialog di mana orang-orang minoritas, secara individu dan kolektif, dapat menentukan posisi mereka dan menegosiasikan identitas dan kepentingan mereka sendiri serta nilai-nilai bersama dari masyarakat yang lebih besar. Stokke & Lybæk (2018) menekankan pada dialog antar budaya yang dikombinasikan dengan multikulturalisme kritis.

Tujuan utama pendidikan multikultural adalah membantu individu mendapatkan pemahaman diri yang lebih besar dengan melihat diri mereka sendiri dari perspektif budaya lain. Pendidikan multikultural mengasumsikan bahwa dengan proses pengenalan dan pengertian, dapat melahirkan rasa hormat (Joshee & Sihra, 2009). Tujuan utama lainnya dari pendidikan multikultural adalah untuk menyediakan alternatif budaya, etnis, dan bahasa kepada siswa. Secara historis, kurikulum sekolah di Amerika Serikat dan negara Barat lainnya berfokus terutama pada budaya dan sejarah kelompok arus utama dengan memanfaatkan pengaruh kekuasaan (Spring, 2004). Lebih jelasnya tentang tujuan Pendidikan multikultural James Banks dapat dilihat dalam ilustrasi 2.2 berikut.



Gambar 2.2: Tujuan Pendidikan Multikultural

5. Dimensi Pendidikan Multikultural

(Bank & Cherry A. McGee Bank, 2004) mengidentifikasi lima dimensi Pendidikan multikulturalisme. *Pertama*, integrasi yang memfokuskan pada isi/materi. *Kedua*, (*knowledge construction*) konstruksi yang memfokuskan pada pengetahuan. *Ketiga*, (*prejudice reduction*) dimensi yang memfokuskan pada pengurangan prasangka. *Keempat*, (*equitable paedagogy*). Dimensi Pendidikan yang adil yang memberikan peluang yang sama bagi siswa untuk berkembang. *Kelima*, (*empowering school culture and social structure*). dimensi pemberdayaan budaya dan struktur sosial.

Dalam kontek teoritis, memperhatikan tipe-tipe pendidikan multikultural yang berkembang di beberapa negara maju, terdapat lima pendekatan, *pertama*,

pendidikan yang menekankan pada perbedaan-perbedaan kebudayaan. *Kedua*, Pendidikan yang menekankan pada pemahaman perbedaan kebudayaan. *Ketiga*, Pendidikan yang menekankan keberagaman/pluralisme kebudayaan. Keempat, Pendidikan dwi budaya. Kelima, Pendidikan multikultural yang menekankan pada pengalaman moral (Mahfud, 2011).

a. Integrasi Konten

Secara terminologi, Moodod dalam karya Race berjudul, *Multiculturalism and Education*, mendefinisikan integrasi sebagai interaksi sosial dua arah, antara kelompok etnis mayoritas dan minoritas dalam proses berintegrasi (Modood & May, 2001). Sedangkan (Mitchell et al., 1999) merupakan integrasi sebuah tema multikultural yang menekankan pada penghapusan perbedaan (segregasi) di tengah masyarakat.

(Banks, 2019) membagi pendekatan integrasi materi multikultural ke dalam suatu bidang studi menjadi empat tingkat, yaitu: Pertama, pendekatan kontribusi (*contribution approach*), pendekatan kontribusi adalah langkah pertama yang direkomendasikan kepada guru yang baru mulai menggunakan konten multikultural di kelas. Pendekatan kontribusi dipandang sebagai cara untuk menambahkan elemen budaya ke subjek sebagai bagian dari konten multikulturalnya. Menurut Banks, dalam pendekatan kontribusi materi multikultural meliputi: tema budaya atau praktik keagamaan. Misalnya, simbol kesukuan, gambar pahlawan, kesenian, bahasa, tradisi, benda sejarah, festival budaya dan hari besar keagamaan.

Kedua, Pendekatan aditif (*additive approach*), Pendekatan Aditif juga sering digunakan oleh guru untuk mengintegrasikan konten tentang kelompok etnis dan budaya ke dalam kurikulum sekolah. Dalam pendekatan ini, organisasi dan struktur kurikulum tetap tidak berubah. Unit khusus tentang kelompok etnis dan budaya ditambahkan ke dalam kurikulum (Banks, 2019). Pendekatan aditif mempunyai cakupan yang lebih luas dari pendekatan kontribusi, selain melakukan penambahan tema budaya, pendekatan aditif juga dilengkapi dengan modul dengan melibatkan beberapa pihak yang dianggap memiliki kapasitas (Banks, 2019).

Ketiga, pendekatan transformasi (*transformation approach*), Pendekatan transformasional untuk pembelajaran multikultural pada dasarnya berbeda dari pendekatan kontribusi dan aditif. Pendekatan transformasional membutuhkan perubahan kurikulum yang sepenuhnya multikultural. Pendekatan ini dilengkapi dengan buku yang diambil dari aspek perbedaan budaya masyarakat suatu negara. Tujuan dari pendekatan transformasi adalah untuk memahami konsep, nilai, tema, isu dan peristiwa siswa tentang multikulturalisme dari perspektif komunitas budaya yang berbeda (Banks, 2019).

Keempat, pendekatan aksi sosial (*social action approach*). Pendekatan aksi sosial merupakan tingkatan tertinggi dari pembelajaran multikultural dan mencakup semua elemen pendekatan transformasional. Dalam pendekatan ini, siswa diajarkan pengetahuan dan keterampilan untuk menghadapi kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memfasilitasi kritik sosial siswa terhadap perubahan kehidupan dalam masyarakat yang berkeadilan (Banks, 2019).

b. Konstruksi yang memfokuskan pada pengetahuan (*knowledge construction*)

Proses konstruksi pengetahuan menggambarkan kegiatan mengajar yang membantu siswa untuk memahami, menyelidiki dan menentukan bagaimana kerangka asumsi budaya implisit dari perspektif referensi dan bias dalam suatu disiplin mempengaruhi cara-cara di mana pengetahuan dibangun (Banks, 1996).

Menurut dimensi ini siswa harus menjadi produsen pengetahuan bukan hanya sebagai konsumen. Proses konstruksi pengetahuan berkaitan dengan sejauh mana guru membantu siswa memahami, menyelidiki dan menentukan bagaimana asumsi budaya implisit, kerangka acuan, perspektif dan bias dalam suatu disiplin mempengaruhi cara-cara di mana pengetahuan dibangun.

c. Dimensi yang memfokuskan pada pengurangan prasangka (*prejudice reduction*)

Sejak tahun 1920 prasangka menjadi masalah serius di beberapa negara seperti Amerika terutama dalam masalah rasial. Dimensi pengurangan prasangka merupakan langkah untuk mengurangi sikap (termasuk cara

pandang) individu atau kelompok dalam membangun hubungan dengan pihak lain.

Sejak Allport (1979) memberikan analisis yang komprehensif tentang prasangka, maka kajian prasangka menjadi daya tarik tersendiri di kalangan peneliti ilmiah. pertama Allport menyebutkan bahwa manusia memiliki kecenderungan alamiah untuk mengkategorikan dan mengelompokkan manusia dalam kategori tertentu, baik warna kulit, cara berpakaian, bahasa, aset ekonomi atau sesembahan yang dipuja, dan lain sebagainya. Efek dari pengelompokan adalah munculnya prasangka, misalnya remaja santri akan memakai peci, warga Nahdliyin akan melakukan qunut subuh, Muhammadiyah cara berpakaianya lebih modernis dan lain-lain.

Kedua, prasangka dapat direduksi dengan mempertentangkan prasangka yang ada dengan norma dengan idealisme atau norma tertentu. Misalnya ada diskriminasi dalam masyarakat, kemudian ajaran agama tentang persamaan manusia dinyatakan kembali sebagai prinsip-prinsip ideal. Maka prasangka akan berkurang. Dalam penelitian Allport, ia menggunakan contoh “Dilema Amerika”; seolah ingin mempertanyakan “bagaimana Amerika bisa terjerumus ke dalam budaya rasisme, padahal bangsa Amerika didirikan di atas prinsip dan cita-cita kesetaraan?”. Bias dapat dikurangi dengan mengontraskan realitas diskriminasi terhadap orang kulit berwarna di Amerika Serikat dengan cita-cita bangsa (Wiranto, 2021).

Ketiga, sumbangan Allport dalam kajian prasangka adalah manfaat kontak atau pertemuan untuk meminimalisir prasangka. Allport menilai bahwa kontak dapat menyadari adanya kebaikan dalam budaya atau tradisi orang lain sebagaimana yang diyakini adanya kebaikan pada budaya atau tradisi sendiri. selain itu kontak juga dapat memahami kekurangan pada budaya atau tradisi sendiri.

Sedangkan Bank melihat bahwa *prejudice reduction*, merupakan pembelajaran berimbang, dan pemberdayaan budaya sekolah serta struktur sosial. Pada bagian prejudice reduction ini, pendidikan multikultural berfokus pada karakteristik dan sikap rasial (dan kultural) siswa dan bagaimana memodifikasinya melalui materi dan proses pembelajaran (Banks, 2019).

Meskipun dalam dunia pendidikan sudah banyak memberikan pengetahuan tentang prejudice reduction akan tetapi tidak semua penelitian memberikan kesimpulan adanya korelasi yang signifikan antara pengurangan prasangka dan tingkat pendidikan (Wiranto, 2021). Misalnya dalam temuan (Weber, 2020) menunjukkan tingkat pendidikan bukanlah faktor satu-satunya dalam membentuk pribadi yang positif. Bahkan dalam banyak kasus ditemukan orang yang tidak pernah kuliah memiliki prasangka yang rendah.

- d. Dimensi Pendidikan yang adil yang memberikan peluang yang sama bagi siswa untuk berkembang (*equitable paedagogy*).

Bank mendefinisikan *equitable paedagogy* dengan "*teaching strategies and classroom environments that assist students from diverse racial, ethnic, and cultural backgrounds in acquiring the knowledge, skills, and attitudes necessary to function successfully within and contribute to the development and maintenance of a just, humane, and democratic society*" berdasar definisi yang dijelaskan Bank, tugas pendidikan tidak hanya memberikan pengetahuan membaca, menulis, menghitung akan tetapi membekali siswa tentang asumsi-asumsi paradigma-paradigma, dan karakteristik-karakteristik kekuasaan. Esensi dari equity pedagogy adalah membantu siswa menjadi warganegara yang aktif dan reflektif menuju masyarakat yang demokratis.

Baik *equity* maupun *equality* berangkat dari pandangan tentang kesetaraan, Parekh, (2008) menjelaskan bahwa kesetaraan memiliki beberapa tingkatan. Pada level yang paling pertama, kesetaraan meliputi hak dan penghargaan; kemudian pada tingkatan berikutnya meliputi pemberian kesempatan, harga diri, kepercayaan diri, dan lainnya; dan tingkatan yang paling tinggi melibatkan kekuasaan, kemampuan dan kesejahteraan, dasar yang diperlukan untuk pengembangan manusia.

Salah satu cara dalam proses untuk mencapai keadilan adalah melalui partisipasi. Secara tidak langsung, keadilan adalah kualitas dari kemampuan berpartisipasi. Persamaan hak dalam penelitian ini meliputi persamaan hak dalam hal kesempatan (*equality of opportunity*) dan persamaan hak dalam hal hasil (*equality of outcomes*). Persamaan hak juga mencakup bagi perseorangan dan kelompok (Busyairy, 2018b).

Aliran keagamaan sebagai salah satu sub-sistemnya, harus memahami bahwa masyarakat merupakan lingkungan yang penuh warna. Aliran keagamaan harus secara adil dan sama dalam memberikan pelayanan serta perlakuan bagi kelompok- kelompok yang berbeda dan biasanya memiliki pengalaman yang tidak menguntungkan. Persamaan direalisasikan dalam kehidupan masyarakat dan dalam lingkungan internal aliran keagamaan.

- e. Dimensi pemberdayaan budaya dan struktur social (*empowering school culture and social structure*)

Dimensi pemberdayaan budaya sekolah dan struktur sosial (*empowering school culture and social structure*), dimensi terakhir, yakni dimensi yang berusaha untuk merawat budaya baik yang sudah ada di tengah lingkungan. Seperti proses sosial yang dunia alami, bahwa tidak relevan lagi ada sistem kasta, mayoritas kelompok superior, minoritas kelompok inferior dalam komunitas, bangsa dan negara. Maka sebagai unit pendidikan, aliran keagamaan perlu merawat budaya inklusif yang multikultural (Maslikhah, 2007)

C. Social Construction

Teoritisasi realitas sosial senantiasa menghadirkan kontroversi, hal ini didasari pada perbedaan titik tolak penekanan kajian, yakni individu atau masyarakat. Auguste Comte menekankan kajian secara “holistic” Leeuw (2014), Dr. Irfan Noor (2011) dimana anggota masyarakat tidak secara bebas menentukan inisiatif akan tetapi tergantung pada hukum universal. Begitu juga dengan perhatian kajian Karl Marx memusatkan perhatian pada tingkat struktur sosial masyarakat. Marx memandang bahwa interaksi produktif dan bersifat berulang-ulang antara individu dan lingkungan alam dan manusia, dari sini manusia dapat membedakan dirinya dengan binatang hasil interaksi inilah yang mengantarkan manusia pada pemenuhan kebutuhan-kebutuhannya melalui proses produksi. Proses inilah yang melahirkan masyarakat. Dengan demikian Marx menempatkan produksi menjadi elemen utama terbentuknya masyarakat (Giddens, 2009)

Pola yang sama juga menjadi pilihan Emile Durkheim dengan lebih ekstrim. Meskipun individu termasuk bagian dari masyarakat, akan tetapi masyarakat merupakan sesuatu yang riil, berproses dengan dengan alur yang khas yang sama

sekali terlepas dari kesadaran individu (Johnson, 1986). Durkheim mendasarkan pemikirannya pada asumsi bahwa kesadaran dan perilaku individu dipengaruhi oleh fakta sosial. asumsi ini memiliki keterhubungan dengan realisme sosial yakni masyarakat ditempatkan menjadi sesuatu yang nyata dan terlepas dari individu-individu didalamnya dan bekerja sesuai prinsip-prinsip yang khas dan bukan cerminan kesadaran individu

Sementara Max Weber menekankan pada kutub individu, menurutnya. Peranan sosial dan struktur sosial bukanlah penghubung yang menghubungkan individu dengan corak perilaku mereka, akan tetapi “makna-makna” yang dilekatkan oleh individu atas perilaku mereka Kilzer et al. (1949), Veeger (1990). Dengan demikian dalam pandangan Weber hanya individu yang benar-benar riil secara objektif. Kecenderungan terhadap kutub individu mengalami perkembangan di era Talcott Parsons, dengan teori fungsionalisme-struktural. Parson memaparkan posisi individu dalam struktur sosial, akan tetapi Parson terjebak menjelaskan fungsi struktur sosial (Veeger, 1990)

Kutub berikutnya diwakili oleh George Herbert Mead dengan teorinya “*interaksionisme-simbolik*” Mead menekankan pada peran pikiran (mind) yang mendasari interaksi individu dengan lingkungannya. Melalui pikiran individu mengartikan serta menafsirkan benda-benda dan peristiwa-peristiwa yang dialaminya. Dalam pandangan interaksionisme simbolik, struktur sosial tidak menentukan, dan hanya menjadi penyedia tindakan-tindakan individu. Baik individu atau struktur sosial dalam pandangan Mead Kembali diabaikan (K.J. Veeger, 1993), Dalam pandangan Mead, hubungan individu dengan lingkungan tidak hanya bersifat reflektif, akan tetapi hubungan yang bersifat dialektis, hubungan yang mencerminkan dimensi fikiran (mind). (Johnson, 1986)

Dari paparan di atas dalam penjelasan beragamnya bentuk-bentuk teoritisasi tampak sekali bahwa tiap kutub pemikiran terjebak dalam determinisme dan kausalitas sepihak. Problem inilah yang ingin dijawab oleh Peter L. Berger dengan bangunan teorinya the social construction of reality. artikulasi perspektif dialektis diharapkan menjadi alternatif untuk problem determinisme yang menganggap individu dibentuk oleh struktur sosial. Berger mengalihkan perhatian dari aktor individu ke hubungan terkoordinasi (Gergen, 2014) Pemikiran ini

menjadi titik tolak perspektif untuk memahami manusia dan dunianya (P. L. Berger et al., 1971). Untuk keperluan Analisa Berger menjadikan fenomenologi sebagai pendekatannya dalam membangun basis utama kajian sosiologinya.

Dalam konteks Analisa kajiannya Berger banyak dipengaruhi oleh pemikiran fenomenologi eksistensial yang bertitik tolak pada Analisa dunia kehidupan, yakni realitas sosial kehidupan keseharian dianggap realitas utama (*paramount reality*). Berger melihat bahwa manusia dilingkupi oleh keterbukaan, sedangkan naluri memiliki pengaruh yang tidak dominan, perilaku manusia dikonstruksi secara mandiri. Kesadaran manusia senantiasa terarah terhadap objek, bersamaan dengan itu kesadaran manusia juga dipengaruhi oleh objek diluaranya. (P. L. Berger & Sudarmanto, 1994)

Berger adalah seorang sosiolog yang produktif. Melalui Karyanya “ *The Social Construction of Reality* (P. L. Berger et al., 1971) yang ditulis bersama Thomas Luckmann adalah salah satu karya paling penting dalam sosiologi interpretative. Melalui Bukunya yang berjudul *Invitation of Sociology* (P. L. Berger, 1963) memberikan pengaruh yang luas terhadap pemikiran akademisi khususnya bidang sosial. bahkan (Hjelm, 2015) menganggap bahwa karya Berger dan Thomas Luckman menjadi salah satu dari sepuluh buku paling berpengaruh dalam sosiologi. Pada awal karirnya, Berger dan Thomas Luckmann, menguraikan pendekatan sosiologi pengetahuan terhadap sosiologi agama (P. L. Berger, 1970), yang kemudian dimasukkan ke dalam Konstruksi Sosial Realitas, yang berkeyakinan bahwa secara empiris masyarakat mengalami proses dialektika tiga 'momen' yang dengan definisi yang berbeda: eksternalisasi (masyarakat adalah produk manusia), objektivasi (masyarakat adalah realitas objektif), dan internalisasi (manusia adalah produk sosial) (P. L. Berger et al., 1971) (Hjelm, 2019). Dengan proses dialektika inilah masyarakat merupakan produk manusia, melalui aktivitas kesadarannya.

Berger dan Luckman merupakan pemikir yang konsisten menelaah sosiologi pengetahuan dan sosiologi agama, Berger dipercaya untuk menjadi profesor sosiologi dan teologi di Boston University tahun 1981, sejak tahun 1985 ditunjuk menjadi direktur di Institute on Culture, *Religion and World Affairs* (Dharma, 2018). Keduanya menekuni konsep sosiologi tentang pengetahuan masyarakat.

Dengan akses yang cukup luas untuk menelaah pemikiran Emile Durkheim (fakta sosial), Max Weber Scheler, George Herbert Mead (teori interaksionisme simbolik), dan Alfred Schutz (Karman, 2015). tentang prinsip sosiologi pengetahuan. Berawal dari pertanyaan apa itu kenyataan. Dominasi pemikiran rasionalisme dan empirisme mengantarkan Berger pada rumusan konsepsi “kenyataan obyektif” dan “kenyataan subyektif”. George Herbert Mead (teori interaksionisme simbolik), dan Alfred Schutz.

Menurut (McQuail 2005; Carey 2009; Littlejohn 2006), social construction umumnya dipahami dengan menggabungkan empat tahapan: *pertama*, aktor sosial membentuk konsep bagaimana langkah membentuk kenyataan, tahapan ini masih berbentuk invisible. *Kedua*, pengawasan (*maintenance*) individu diharuskan aktif agar terbangun konstruksi sosial, dalam tahapan ini ada dua kemungkinan yakni. Apabila secara konsisten dijaga maka konstruksi sosial akan tetap eksis, akan tetapi jika diabaikan dan dianggap tidak relevan dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat maka akan diabaikan. Ketiga, perbaikan. Perbaikan aktor sosial (*social actors*). Individu perlu memperbaiki konstruksi karena terdapat kemungkinan adanya aspek yang dilupakan. *Keempat*. Perubahan (*change*). bisa saja dalam perjalanan waktu, konstruksi tidak lagi dianggap sesuai oleh generasi berikutnya, sehingga perlu perbaikan (Littlejohn, 2006).

Berger dan Luckman memandang bahwa masyarakat akan berproses secara dialektik fundamental dengan tiga fase atau momentum yaitu *eksternalisasi*, *objektifikasi* dan *internalisasi*. Dengan tiga fase tersebut Berger menggambarkan bahwa manusia merupakan produk manusia melalui aktivitas dalam kehidupan (P. L. Berger, 1992). Lantas, Apa sebenarnya yang dikonstruksi dalam pandangan konstruksi sosial Peter L Berger (Ian Hacking, 1999)? (Fairclough, 1992) menggambarkan tiga fokus utama untuk: (1) identitas sosial, (2) hubungan sosial, dan (3) sistem pengetahuan dan kepercayaan (Hjelm, 2019).

Melalui tiga teorinya Berger ingin menunjukkan poses eksistensi individu dalam dunia sosialnya bersifat konstruktif, artinya dalam kehidupan sosialnya individu secara dialektis yang berkesinambungan, oleh sebab itu proses sebab dan akibat dalam kehidupan sosial bersifat saling berkaitan, sebagaimana tiga momentum dalam teori Berger memiliki keterkaitan (Fairclough, 1992). Liebrucks

(2015) memperjelas posisi konstruksionis sosial melalui analisis konsep sentralnya, yaitu “konstruksi sosial”. (1) Tiga tesis utama yang terkait dengan konsep ini seperti yang digunakan dalam perdebatan epistemologis diidentifikasi: (a) Produksi pengetahuan adalah proses interpretasi kreatif dan tidak dapat dibingkai secara memadai dalam teori pengetahuan yang logis. (b) Dalam eksperimennya, para ilmuwan secara aktif bercita-cita untuk menghasilkan hasil yang sesuai dengan teori mereka. (c) Pengetahuan selalu didasarkan pada latar belakang asumsi kontingen dan praktik investigasi lokal.

Dalam pandangan Berger & Luckmann (2012), Masyarakat merupakan realitas obyektif menunjukkan pelembagaan di dalamnya. Proses pelembagaan (institusionalisasi) berawal dari proses eksternalisasi terjadi secara kontinyu sehingga terdapat pola yang dipahami secara bersama-sama, kemudian menghasilkan apa yang disebut oleh Berger sebagai *habitualisasi* atau pembiasaan. *Habitualisasi* yang berlangsung dalam waktu tertentu, melahirkan pengendapan dan tradisi. Langkah berikutnya Pengendapan dan tradisi diwariskan ke generasi selanjutnya melalui bahasa. Disinilah terlihat peran tatanan kelembagaan, termasuk dalam adalah proses pentradisian pengalaman dan pewarisan pengalaman tersebut. Jadi pelaksanaan peranan merupakan representasi diri sendiri. Peranan mempresentasikan keseluruhan langkah-langkah perilaku yang melembaga, misalnya peranan kyai dengan peran-perannya di sektor sosial kemasyarakatan. objektif, Masyarakat juga menunjukkan keterlibatan apa yang disebut oleh Berger dengan legitimasi. Legitimasi merupakan bagian dari proses objektivasi makna pada tingkat kedua, dan menjadikan pengetahuan yang memiliki dimensi kognitif dan normatif sekaligus, karena menyangkut penjelasan dan nilai-nilai sekaligus. Legitimasi memiliki fungsi untuk melahirkan objektivasi yang melembaga dan dianggap rasional secara subjektif.

Untuk melengkapi proses legitimasi dalam pandangan Berger & Luckmann (2012) diperlukan universum simbolik yang untuk legitimasi dan pengaturan pelembagaan. Posisi universum simbolik dalam hirarki Berger menempati kedudukan tinggi, mengisyaratkan bahwa semua realitas memiliki makna bagi individu. Peran organisasi sosial berperan memelihara universum simbolik. Maka, dalam pandangan ini, organisasi sosial dibuat dengan menyesuaikan dengan

universum simbolik. Di sisi berbeda, legitimasi tidak begitu saja diterima. pada kondisi tertentu universum simbolik yang lama dianggap tidak relevan, kemudian ditinggalkan. Melalui organisasi sosial manusia membentuk universum simbolik baru. Dan konteks ini, legitimasi/teori menjadi alat legitimasi organisasi sosial. pada Prosesnya "legitimasi lembaga sosial" menuju "lembaga sosial sebagai penjaga legitimasi" terus berlangsung secara dialektik proses ini akan berdampak pada perubahan sosial.

Beberapa gagasan pemikiran Berger dalam kajian sosiologinya. *Pertama*, Kenyataan Hidup Sehari-hari dan Karakteristiknya. Mengawali analisisnya Berger menempatkan kenyataan sehari-hari menjadi pembimbing perilaku manusia, kenyataan ini oleh Berger disebut kenyataan *par excellence*. (P. L. Berger & Luckmann, 2012). Kenyataan keseharian tidak begitu saja diterima oleh masyarakat yang memiliki makna subjektif dalam kehidupannya. Pikiran dan tindakan masyarakat dipelihara dan menjadi apa yang disebut Berger dengan "yang nyata". Dalam konteks ini kenyataan sehari-hari, sudah melalui tahapan objektifikasi (P. L. Berger & Luckmann, 2012).

Kedua, Interaksi intersubjektif dan spesifikasinya, berikutnya kenyataan hidup menghadirkan sesuatu yang intersubjektif yang berlangsung antara individu dan orang lain disekitarnya. Intersubjektivitas inilah yang membedakan kehidupan tiap orang. Berger menggambarkan sebagai berikut:

Interaksi dan komunikasi yang dilakukan secara terus menerus merupakan eksistensi dalam kehidupan. Sikap alamiah individu senantiasa berkesesuaian dengan sikap alamiah individu lainnya, tiap individu mencoba memahami dan menata berbagai objektifikasi dunia sekitarnya secara berkelanjutan (P. L. Berger & Luckmann, 2012).

Sikap alamiah merupakan kombinasi dari akal sehat dan dunia yang secara bersama-sama dialami oleh komunitas. Pengetahuan akal sehat atau common sense knowledge merupakan pengetahuan yang diproduksi dan dimiliki secara bersama-sama dalam interaksi bersama. Interaksi yang dilakukan secara tatap muka yang disebut prototipikal dari interaksi sosial. subjektivitas antar individu sangat terbuka dengan memahami gejala-gejala. Memahami paparan di atas, tipikasi menjadi media pola interaksi intersubjektivitas. Tifikasi-tifikasi secara konsisten mempengaruhi interaksi antar individu (P. L. Berger & Luckmann, 2012).

Ketiga, Ketiga, Cadangan Pengetahuan dalam Masyarakat, aspek ini berpengaruh besar untuk keberlangsungan interaksi intersubjektivitas serta polatifikasi. Cadangan pengetahuan manusia merupakan bentuk akumulasi yang diseleksi melalui pengalaman historis atau biografis yang secara terus menerus mengalami tahap objektivitas dalam masyarakat. Dari sinilah terbentuk cadangan pengetahuan yang diwariskan dari generasi ke generasi (P. L. Berger & Luckmann, 2012). Cadangan pengetahuan selain menentukan tempat dan kedudukan masyarakat juga berfungsi untuk menyeleksi kenyataan yang didasarkan pada keakraban.

Proposisi yang dapat diajukan dalam menelaah fenomena lapangan dalam penelitian ini adalah bahwa dunia makna dibangun secara sosial berawal dari penataan pengalaman. Aktivitas masyarakat merupakan fenomena membangun dunia.

1. Individu dan Dunia Sosial

Dalam memahami hakikat manusia, Berger menempatkan individu berada dalam proses eksistensi dengan dunianya, tidak menempatkan dalam suatu pemahaman tentang dasar kodratnya, serta upayanya untuk memahami dunia sosial yang tidak ada secara alami dan tumbuh dari esensi ontologi, tetapi sebagai konstruksi manusia itu sendiri, dan kemudian ditetapkan berbagai sistem sosial (Noor, 2011). Berbekal asumsi filosofis Husserl tentang kedirian manusia dengan kapasitas internasionalnya yang menjadi dasar kedirian manusia. Berger menjadikan kapasitas kedirian menjadi landasan argumentasi saat menjelaskan pola relasi manusia dan dunianya. Asumsi Husserlian nampak jelas dalam pemikiran Berger yang menempatkan kedirian manusia sebagai sesuatu yang khas dalam dunia binatang (P. L. Berger, 1967b). Ketidaksempurnaan organisme manusia saat dilahirkan menjadi pandangan dasar untuk menetapkan manusia dalam organisme yang belum selesai. (Noor, 2011). Proses penyempurnaan organisme ini disebutkan oleh Berger manusia di satu sisi adalah tubuh, dan disisi lain adalah pemilik tubuh dalam pemaknaan berbeda, sebagai entitas manusia tidak identic dengan tubuhnya, akan tetapi pemilik tubuh manusia dapat mempergunakannya, dengan demikian, pengalaman manusia berada antara keberadaan tubuh dan pemilik tubuh (P. Berger & Hefner, 2003).

Adapun titik tolak pemikiran Berger tentang eksistensi manusia merupakan hasil dari kenyataan sehari yang menampakkan kenyataan dari hasil interpretasi yang memiliki makna subjektif tentang satu dunia yang koheren (P. L. Berger, 1967a). Berasal dari titik tolak asumsi tentang kapasitas kedirian manusia ini, setidaknya terdapat dua implikasi secara langsung atas pengertian mengenai dunia sosial dan ragam hubungan manusia. *Pertama*, tatanan sosial bukan bagian dari “kodrat alam”, dan bukan dari penjabaran dari “hukum-hukum alam”. Tatanan sosial merupakan hasil dari produk aktivitas manusia (P. L. Berger, 1970). *Kedua*, ketidakpastian bawaan merupakan bagian dari ciri realitas hubungan organisme individu dengan lingkungan sekitarnya. Organisme manusia tidak punya alat biologis yang dibutuhkan untuk menghadirkan stabilitas untuk perilaku manusiawi. (P. L. Berger & Luckmann, 2012).

Untuk menciptakan kestabilan duniawi, manusia membutuhkan pertama, suatu tatanan sosial yang mapan seras mendahului perkembangan organisme individu. Kedua, dengan karakter ketidakstabilan dalam organisme manusia yang menuntut lahirnya kondisi lingkungan yang stabil. Tatanan sosial yang dimaksud Berger adalah kebudayaan merupakan totalitas produk-produk manusia. Dari sinilah penentuan karakteristik yang diungkapkan (P. L. Berger & Luckmann, 2012) “Masyarakat diselenggarakan oleh manusia yang melahirkan aktivitas. Pola-polanya selalu memiliki hubungan dengan tempat, ruang dan waktu, tidak bisa disimpulkan secara apa-pun dari “hakikat manusia”

Dalam proses objektivitas dan status sosial, Berger memaparkan asumsi dasarnya bahwa manusia akan mengalami proses pembiasaan (*habitualization*). Meskipun kebiasaan terjadi secara rutin, akan tetapi tetap memiliki makna (P. L. Berger & Luckmann, 2012). Hal yang penting dalam pembiasaan selanjutnya adalah titik tolak dari pembiasaan adalah petunjuk dan pemberi arah yang tidak terdapat dalam dimensi biologis manusia. Pembiasaan akan memberikan kestabilan dalam aktivitas sosial manusia.

Aktivitas pembiasaan menjadi dasar bagi konstruksi masa depan manusia. (Collins, 2016). Hal yang penting untuk diperhatikan dalam proses pembiasaan ini adalah *tipifikasi* yang terjadi secara timbal balik yang berakar pada aktivitas-aktivitas yang sudah terbiasa. Proses tipifikasi ini akan berlangsung dalam

perjalanan kehidupan sosial (P. L. Berger & Luckmann, 2012). Menurut Noor (2011) pada segmen ini aktivitas manusia sudah dilembagakan, dengan begitu bahwa segmen aktivitas sudah berada dibawah kendali sosial. asumsi-asumsi inilah yang mendasari pemikiran Berger tentang kebudayaan, saat kebudayaan telah melalui proses objektifikasi, akan terdapat makna ganda. Makna ganda yang dimaksud Berger adalah; dalam pengertian bahwa kebudayaan menghadapi manusia sebagai sekumpulan benda-benda yang ada dalam dunia nyata, kebudayaan eksis di luar kesadaran manusia.

Terdapat beberapa legitimasi sosial yang berlangsung dalam tatanan masyarakat; *pertama*, Legitimasi dan Fungsi Sosialnya. Legitimasi berperan dalam menjelaskan tatanan kelembagaan yang menentukan kebenaran kepada makna yang telah melalui proses objektifikasi. Dua unsur penting dalam legitimasi yakni kognitif dan normatif (Hjelm, 2018). Dengan makna berbeda Dreher (2016) memaparkan bahwa legitimasi bukan sekedar perkara “nilai-nilai” akan tetapi implikasi “pengetahuan”. Fungsi legitimasi dalam pandangan Peter L. Berger & Luckmann (2012) juga berfungsi “integratif”.

Bentuk awal yang mendasari legitimasi tingkat *pertama* adalah afirmasi tradisional/pra-teoritis yang sangat sederhana, yakni pengalihan suatu objektifikasi kebahasaan tentang pengalaman manusia. *Kedua*, pembentukan legitimasi kemudian mengalami perkembangan menuju proposisi-proposisi teoritis meskipun belum sempurna. *Ketiga*, legitimasi yang didasarkan pada seperangkat pengetahuan yang berbeda-beda. Pada fase membentuk kerangka referensi yang komprehensif. *Keempat*, legitimasi yang berbentuk universum simbolik, akar proses pembentukan universum simbolik adalah konstitusi manusia, yakni proses manusia ber-eksternalisasi secara bertahap dan terus menerus.

Proyeksi dalam proses eksternalisasi inilah yang memberikan makna-makna sendiri dalam kenyataan (P. L. Berger & Luckmann, 2012). Menggabungkan diskusi di atas, universum simbolik juga digunakan untuk mengatur sejarah. Semua peristiwa kolektif ditempatkan dalam satu kesatuan yang kohesif, termasuk masa lalu, masa kini dan masa depan. Mengenai masa lalu, itu menciptakan "ingatan" dan menjadi milik bersama semua individu

kemudian disosialisasikan secara kolektivitas yang memiliki keterkaitan. Sedangkan mengenai masa depan, ia membentuk kerangka referensi umum yang digunakan untuk memprediksi tindakan tiap individu (Noor, 2011).

D. Akulturasi

1. Pengertian Akulturasi

Konsep akulturasi berakar pada antropologi tetapi telah digunakan dalam disiplin lain seperti psikologi, sosiologi, dan kesehatan masyarakat. Pada tahun 1895, antropolog Amerika (Herskovits, 1938), yang mempelajari perbedaan etnografi antara Pribumi Indian, Pribumi Alaska, dan Afrika relatif terhadap Eropa Dunia Baru, menciptakan istilah akulturasi. Akulturasi adalah proses ganda dari perubahan budaya dan psikologis yang terjadi hasil kontak antara dua atau lebih kelompok budaya dan anggota individu mereka. Di tingkat kelompok, ini melibatkan perubahan dalam struktur dan institusi sosial dan budaya (J. W. Berry, 2005b).

Akulturasi adalah proses perubahan budaya dan psikologis yang melibatkan berbagai bentuk akomodasi timbal balik, yang mengarah pada adaptasi psikologis dan sosial budaya jangka panjang antara kedua kelompok atau lebih. Kontak dan perubahan terjadi karena sejumlah alasan, termasuk kolonisasi, invasi militer, migrasi, dan persinggahan (seperti pariwisata, studi internasional, dan penempatan di luar negeri); itu berlanjut lama setelah kontak awal dalam masyarakat yang majemuk secara budaya, dimana komunitas etnokultural mempertahankan ciri-ciri budaya warisan mereka. Salah satu ciri utama dari semua fenomena akulturasi adalah variabilitas yang terjadi: ada perbedaan kelompok dan individu yang besar dalam cara orang berusaha melakukan akulturasi mereka (disebut strategi akulturasi), dan dalam sejauh mana mereka mencapai hasil yang memuaskan (J. W. Berry, 1992).

Dalam rumusan berbeda akulturasi dimaknai sebagai Perubahan budaya yang diprakarsai oleh penggabungan dua atau lebih sistem budaya otonom. Perubahan akulturasi mungkin merupakan konsekuensi dari transmisi budaya langsung; itu mungkin berasal dari penyebab non-budaya, seperti modifikasi ekologi atau demografis yang disebabkan oleh budaya yang melanggar; mungkin tertunda, seperti penyesuaian internal yang mengikuti penerimaan sifat

atau pola asing; atau mungkin adaptasi reaktif dari cara hidup tradisional (Barnett et al., 1954).

Akulturası terjadi pada masyarakat plural, masyarakat di mana lebih dari satu kelompok budaya atau etnis terwakili dalam populasi, dan ada kemungkinan bahwa kelompok-kelompok tersebut akan mampu mempertahankan diri mereka di masa depan. Dalam situasi seperti itu, proses akulturası mungkin terjadi, sehingga individu dan kelompok yang saling berhubungan saling mempengaruhi, mendorong beberapa tingkat perubahan dalam cara hidup masing-masing dan dalam perilaku individu mereka (J. W. Berry, n.d.) individu yang berakulturası cenderung memiliki sikap terhadap cara-cara di mana mereka ingin terlibat, dan berhubungan dengan, orang dan kelompok lain yang mereka temui di arena akulturası mereka.

Model ini didasarkan pada pengamatan bahwa dalam masyarakat majemuk, individu dan kelompok harus menghadapi dua isu penting. *Pertama*, berkaitan dengan pemeliharaan dan pengembangan kekhasan etnis seseorang dalam masyarakat, memutuskan apakah identitas budaya dan adatnya sendiri bernilai atau tidak dan harus dipertahankan. *Kedua*, Isu yang melibatkan keinginan kontak antar-etnis, memutuskan apakah hubungan positif dengan masyarakat yang lebih besar bernilai dan harus dicari. Ini pada dasarnya adalah pertanyaan tentang nilai, bahkan ideologi, dan dapat ditanggapi dalam skala berkelanjutan, dari positif hingga negative (J. W. Berry et al., 1989).

Akulturası memahami fenomena yang terjadi ketika kelompok individu yang memiliki budaya berbeda melakukan kontak tangan pertama yang terus menerus, dengan perubahan selanjutnya dalam pola budaya asli dari salah satu atau kedua kelompoknya. Dalam definisi ini, akulturası harus dibedakan dari perubahan budaya, yang mana itu hanyalah satu aspek, dan asimilasi, yang kadang-kadang merupakan fase akulturası (Redfield et al., 1936)

Secara umum, akulturası Merupakan proses sosial yang terjadi ketika terjadi penyatuan dua atau lebih budaya yang berbeda menjadi budaya yang baru tanpa menghilangkan unsur budaya lama. Kondisi ini bisa terjadi apabila terdapat budaya asing yang masuk dan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat tanpa menghilangkan budaya aslinya.

2. Strategi akulturasi

Masalah penting yang perlu dipahami untuk proses akulturasi adalah situasi historis dan sikap yang dihadapi oleh para pendatang dalam masyarakat yang menetap. Beberapa masyarakat menerima keragaman budaya yang disebabkan oleh perpindahan penduduk/kontak dengan dunia luar, mengambil langkah-langkah untuk mendukung keberlanjutan keragaman budaya menjadi sumber daya komunal bersama. Posisi ini mewakili ideologi multikultural yang positif (J. W. Berry, 1999) dan sesuai dengan harapan bahwa strategi integrasi akan menjadi cara yang tepat di mana komunitas budaya harus terlibat satu sama lain. Masyarakat lain berusaha untuk menghilangkan keragaman melalui kebijakan dan program asimilasi, dan masyarakat lain berusaha untuk mencapai segregasi atau marginalisasi populasi mereka yang beragam.

Berry menyatakan bahwa terdapat beberapa variasi dalam proses akulturasi yang terdiri dari dua komponen yang memiliki keterkaitan: *pertama*, sikap sebagai preferensi individu tentang bagaimana melakukan akulturasi; *Kedua*, adalah perilaku merupakan aktivitas aktual seseorang yang menunjukkan dalam pertemuan antar budaya sehari-hari. Kedua komponen ini tetap berbeda, baik secara konseptual maupun empiris, karena biasanya tidak ada korespondensi yang lengkap di antara keduanya; Batasan seringkali dipaksakan oleh kelompok dominan sehingga individu tidak sepenuhnya bebas untuk bertindak sesuai dengan kesukaannya. Namun demikian, ketika ukuran preferensi dan perilaku keduanya dimasukkan dalam penilaian gabungan tentang bagaimana orang-orang melakukan akulturasi, biasanya ada pola yang menunjukkan strategi yang konsisten (J. W. Berry, 2005b).

Strategi akulturasi telah diturunkan dari dua masalah dasar yang dihadapi semua masyarakat akulturasi. Kedua masalah ini didasarkan pada perbedaan antara orientasi terhadap kelompoknya sendiri dan orientasi terhadap kelompok lain (J. W. Berry, 2005b). Masalah-masalah ini melibatkan perbedaan antara (1) preferensi relatif untuk mempertahankan budaya dan identitas warisan seseorang, dan (2) preferensi relatif untuk melakukan kontak dengan dan berpartisipasi dalam masyarakat yang lebih luas bersama dengan kelompok etnokultural lainnya.

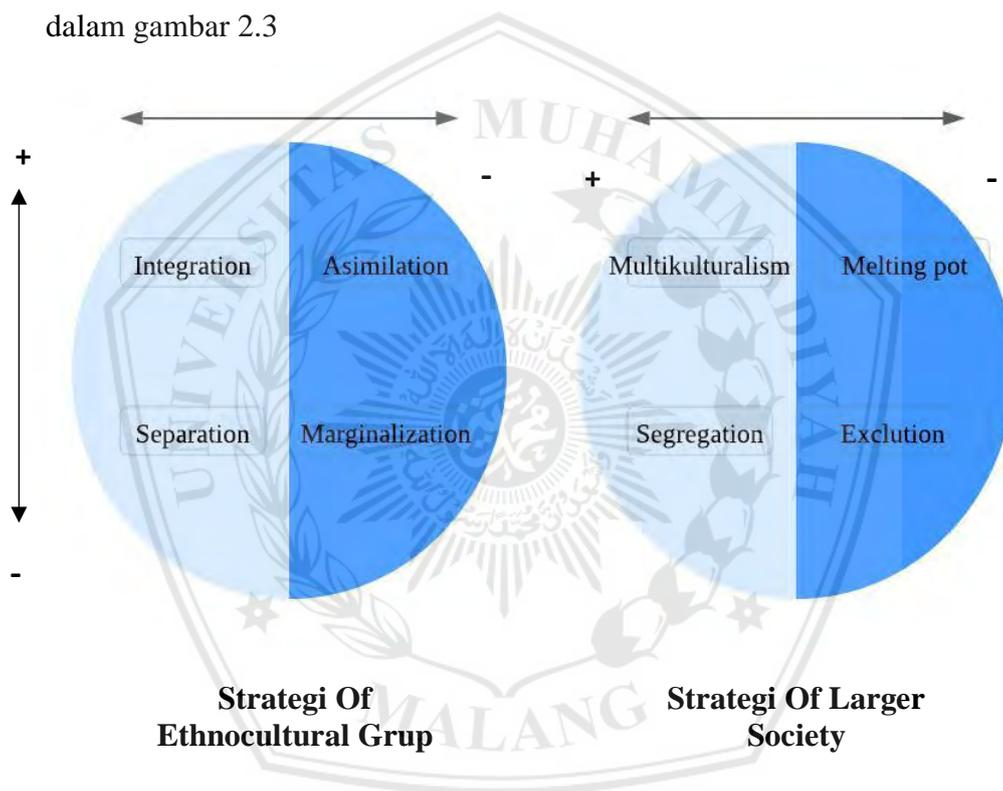
Masalah-masalah ini disajikan dalam Sikap dan perilaku terkait kedua masalah ini dapat berkisar pada dua dimensi ini, yang diwakili oleh panah bipolar. Untuk tujuan presentasi, umumnya orientasi positif atau negatif terhadap isu-isu ini berpotongan untuk mendefinisikan empat strategi akulturasi. Strategi-strategi ini membawa nama yang berbeda, tergantung pada kelompok mana (yang dominan atau non-dominan) sedang dipertimbangkan (J. Berry, 2007).

Salah satu masalah yang menarik saat ini adalah konseptualisasi strategi akulturasi yang tepat. Pendekatan konseptual yang disajikan di sini didasarkan pada keberadaan tiga dimensi yang mendasarinya: pemeliharaan tradisi, kontak dan partisipasi organisasi keagamaan, dan kesepakatan untuk memutuskan bagaimana akulturasi akan berlangsung. Untuk waktu yang lama, hanya satu dimensi yang dipertimbangkan: diasumsikan bahwa kelompok dan individu non-dominan akan berpindah dari tradisi lama ke cara yang menyerupai masyarakat dominan. Konsepsi asimilasi atau *melting pot* tentang tujuan akulturasi.

Dalam pandangan J. W. Berry (2005) Perubahan ini terjadi karena sejumlah alasan. *Pertama*, pada tingkat pengamatan etnografi (dan konsisten dengan definisi awal akulturasi), asimilasi bukanlah satu-satunya bentuk akulturasi; hal ini tidak selalu terjadi dan jarang sekali tujuannya yang dianut oleh kelompok-kelompok yang melakukan akulturasi. Sementara perubahan budaya ada di mana-mana, kelompok budaya di seluruh dunia belum hilang, dan homogenitas budaya tidak dihasilkan dari kontak antar budaya. Resistensi terhadap asimilasi (pemisahan), dan pembentukan budaya baru setelah kontak adalah fenomena umum.

Kedua, pada tingkat interaksi sosial, bagian sentral dari dimensi tunggal ini masih bersifat ambigu: Apakah mewakili dan menjadi preferensi yang mewakili dari keseluruhan tradisi keagamaan, atau menjadi tradisi yang benar-benar baru? Dua konseptualisasi untuk menganalisa akulturasi tradisi keagamaan disini adalah " integrasi " dan " marginalisasi " meskipun dalam pandangan J. W. Berry (2005) belum ada konsep yang dapat menyatukan keduanya dalam proses akulturasi.

Untuk mengatasi proses perubahan akulturasi, beberapa langkah adaptasi dapat dilakukan adaptasi mengacu pada perubahan yang relatif stabil yang terjadi pada individu atau kelompok sebagai respons terhadap tuntutan eksternal. Adaptasi dapat meningkatkan kesesuaian antara individu dan lingkungannya. dengan demikian proses integrasi tidak selalu menyiratkan proses asimilasi. adaptasi sosio kultural mengacu pada seberapa baik individu yang terlibat dalam akulturasi mampu mengatur kehidupan sehari-hari dalam konteks budaya baru. Meskipun secara konseptual berbeda, keduanya secara empiris terkait sampai batas tertentu (J. Berry, 2007). Ilustrasi perubahan akulturasi Berry dapat dilihat dalam gambar 2.3



Gambar 2.3: Perubahan dalam Akulturasi

Strategi akulturasi dalam pandangan Berry memiliki perbedaan tergantung pada etnokulturalnya. Berry menyebutkan beberapa strategi akulturasi:

a. *Assimilation Strategy*

Asimilasi terjadi ketika individu mengadopsi norma-norma budaya dari budaya dominan atau tuan rumah, atas budaya asli mereka. Pemisahan terjadi ketika individu menolak budaya dominan atau tuan rumah demi

melestarikan budaya asal mereka. Asimilasi merupakan akulturasi dimana individu kehilangan identitas budaya aslinya dan mendapat identitas baru dari budaya tuan rumahnya (Utami, 2015).

Gagasan asimilasi yang terkoordinasi itu sendiri digambarkan oleh upaya untuk mengurangi perbedaan antara individu atau kelompok, atau kualitas sosial mereka. Untuk mengurangi perbedaan ini, osmosis ditunjukkan dengan upaya untuk mempererat solidaritas dalam kegiatan, sentimen, dan perspektif dengan mempertimbangkan kepentingan dan tujuan normal (Palm, 1980).

Proses asimilasi menyebabkan melemahnya batas-batas antar individu dalam suatu kelompok, atau batas-batas antar kelompok. Terdapat tiga syarat asimilasi yang harus dipenuhi: adanya sejumlah kelompok dengan perbedaan budaya, terdapat hubungan atau interaksi yang intensif dalam berjangka panjang antara individu atau kelompok, dan terdapat perubahan budaya dan nilai pada masing-masing kelompok (Koentjaraningrat, 1987).

b. Integrasi (*integration*)

Integrasi terjadi ketika individu mampu mengadopsi norma-norma budaya dari budaya dominan atau tuan rumah sambil mempertahankan budaya asal mereka. Integrasi mengarah dan sering identik dengan *bikulturalisme*. Integrasi memungkinkan individu mempertahankan identitas budaya aslinya saat melakukan kontak dengan budaya tuan rumah. Pada model ini, individu membangun sejenis orientasi bicultural yang sukses bercampur dan menyatukan dimensi budaya dari kedua kelompok untuk saling berinteraksi tanpa halangan sosial hirarki. Model lain menyebutnya dengan pluralisme atau multikulturalisme (Utami, 2015).

Murphy (1973), berpendapat bahwa masyarakat yang mendukung pluralisme budaya (yaitu, dengan ideologi multikultural yang positif) memberikan konteks pemukiman yang lebih positif karena dua alasan: mereka cenderung tidak memaksakan perubahan budaya (asimilasi) atau pengucilan (segregasi dan marginalisasi) pada imigran, dan mereka lebih mungkin memberikan dukungan sosial baik dari lembaga masyarakat yang lebih luas (misalnya, perawatan kesehatan yang peka budaya dan kurikulum

multikultural di sekolah), dan dari komunitas etnokultural yang terus berkembang dan terus berlanjut yang biasanya membentuk masyarakat majemuk (Feather, 1979), (Lebedeva & Tatarko, 2004).

c. Separasi (*separation*)

Separasi yaitu dimana individu lebih memilih interaksi tingkat rendah dengan budaya tuan rumah, menginginkan hubungan yang tertutup, dan cenderung memperbaharui budaya asli mereka. Di sini, individu menolak akulturasi budaya dominan dan memilih untuk tidak mengidentifikasi diri dengan kelompok budaya tuan rumah. Sementara itu, yang lain memegang identitas budaya asli mereka. Orang memilih untuk berpisah karena faktor sosial atau sejarah yang memusuhi budaya negara tuan rumah. Model lain menyebutnya dengan pluralisme atau multikulturalisme. Dalam Model separasi Individu atau kelompok yang bermigrasi mempertahankan budaya asli mereka dan menolak budaya baru yang dihadapi (Maxwell-McCaw & Zea, 2011).

d. Marginalisasi (*marginalization*)

Marginalisasi ini terjadi ketika individu memilih untuk tidak mengidentifikasi dengan budaya asli atau budaya tuan rumah. Dalam banyak kasus, orang-orang yang terpinggirkan meninggalkan budaya asli mereka hanya untuk mengetahui bahwa mereka tidak diterima oleh budaya tuan rumah, dan akan beradaptasi jika diberi kesempatan. Dari pengalaman orang-orang yang terasing dari kedua budaya tersebut, mereka sering merasa tertinggal (misalnya pemabuk, pengguna narkoba, terinfeksi HIV). Allen dkk., (2011) menyatakan bahwa dalam akulturasi marginalisasi individu atau kelompok yang bermigrasi kehilangan kedua budaya mereka dan merasa terasing dari masyarakat.

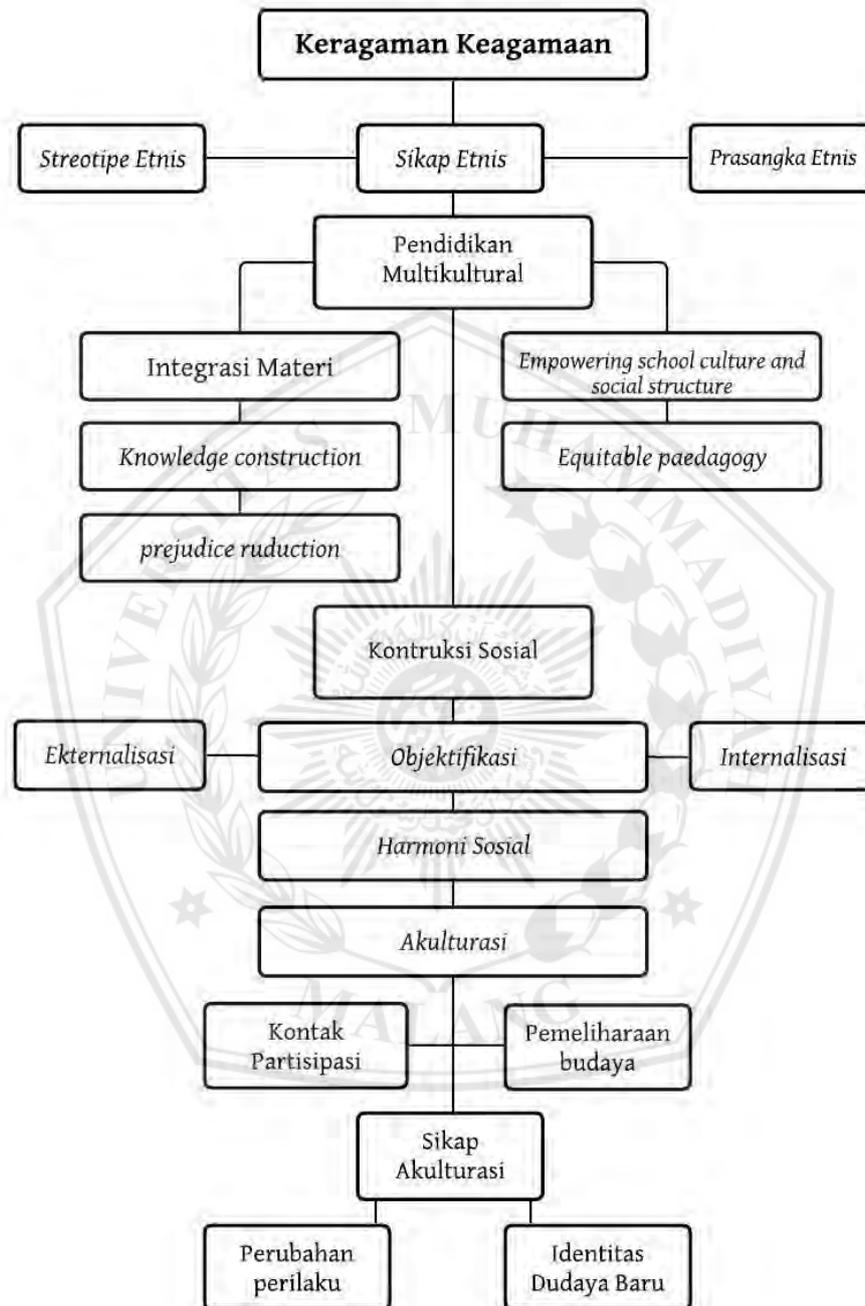
Teori akulturasi Berry menekankan bahwa setiap individu atau kelompok yang bermigrasi memiliki pengalaman dan kebutuhan yang berbeda dalam proses adaptasi mereka. Oleh karena itu, penting untuk memahami jenis adaptasi apa yang sedang terjadi dan mengambil tindakan yang tepat untuk membantu individu atau kelompok tersebut beradaptasi dengan budaya baru tanpa kehilangan budaya asli mereka.

Studi menunjukkan bahwa strategi akulturasi yang digunakan orang dapat berbeda antara area kehidupan pribadi dan publik mereka (Navas et al., 2007) (Arends-Tóth & van de Vijver, 2004). Misalnya, seorang individu mungkin menolak nilai-nilai dan norma-norma budaya tuan rumah dalam kehidupan pribadinya (pemisahan) tetapi ia mungkin beradaptasi dengan budaya tuan rumah di bagian publik hidupnya (yaitu, integrasi atau asimilasi). Selain itu, sikap terhadap akulturasi dan berbagai strategi akulturasi yang tersedia belum konsisten dari waktu ke waktu. Misalnya, untuk sebagian besar sejarah Amerika, kebijakan dan sikap didasarkan pada hierarki etnis yang mapan dengan harapan asimilasi satu arah untuk imigran Eropa yang didominasi kulit putih (Fredrickson, 2000).



E. Kerangka Teoritis

Untuk memudahkan memahami posisi teori dalam penelitian ini, berikut ilustrasi kerangka teoritis seperti dalam gambar 2.4:



Gambar 2.4: Kerangka Teoritis